



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN 2025

**DP3AP2KB
KOTA CILEGON**

**Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana**



<https://dp3ap2kb.cilegon.go.id/>



@dp3ap2kb.cilegon



@dp3akbtvcilegon

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang mendalam kepada Sang Pencipta atas Rahmat dan Karunia-Nya yang melimpah sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon Tahun 2025. LKjIP merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja tujuan dan sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian kinerja sesuai target. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan DP3AP2KB Kota Cilegon pada tahun-tahun selanjutnya.

Oleh karena itu masukan dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berikutnya sehingga dengan laporan yang akurat sesuai dengan realisasi kinerja akan memudahkan dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan organisasi sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Cilegon, 30 Januari 2026

KEPALA DP3AP2KB KOTA CILEGON



Hj. Lia Nurlia Mahatma, ST., M.Si.

NIP. 19710708 199703 2 005

Pembina Utama Muda/IV.c

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DP3AP2KB Kota Cilegon. Kinerja DP3AP2KB Kota Cilegon diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025 terdiri dari 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama. Hasil evaluasi sampai 31 Desember 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. **27.538.123.224,-** (*Dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp. **28.994.614.552,-** (*Dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empatbelas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*) dengan persentase pencapaian realisasi anggaran sebesar **94,98%**.

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan Renstra dari Renstra Tahun 2021 – 2026 ke Renstra Tahun 2025 – 2029, dikarenakan adanya dinamika pemilihan Kepala Daerah secara serentak di Indonesia. Oleh Karena itu terdapat 2 (dua) ketercapaian realisasi Indikator Kinerja Utama sesuai Renstra Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Tahun 2025 – 2029.

Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan RENSTRA Tahun 2021 – 2026

TARGET	REALISASI	INDIKATOR KINERJA	GRAFIK	KETERANGAN
68,18 poin	79,93 poin	Nilai Lakip Perangkat Daerah		Pada tahun 2025 nilai LAKIP mencapai 79,93 poin. Mengalami peningkatan sebesar 11,75 poin dari tahun sebelumnya
72,85 poin	72,85 poin	Indeks RB Perangkat Daerah		Nilai ini merupakan nilai indeks RB pada tahun 2023 dan belum ada penilaian secara khusus di Tahun 2025
90,63 poin	93,50 poin	Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini merupakan nilai rata- rata IKM yang dilakukan setiap bulan, nilai ini merupakan nilai self assesment di tahun 2025
1,5%	1,1%	Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk		Capaian indikator ini sebesar 1,1% merupakan capaian di tahun 2024
30 per 100.000	21,79 per 100.000	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO		Capaian kinerja rasio kekerasan terhadap perempuan tahun ini dalam angka 21,79 per 100.000, artinya dari 100.000 orang penduduk perempuan ada yang mengalami kekerasan sebanyak 22 orang perempuan.
100 %	100 %	Presentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani		Capaian Kinerja Presentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani sesuai target dan mencapai 100%
45 %	47,54 %	Presentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya		Capaian Kinerja Presentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya melebihi target dan mencapai 105,64 %

Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan RENSTRA Tahun 2025 – 2029

TARGET	REALISASI	INDIKATOR KINERJA	GRAFIK	KETERANGAN
0,248 indeks	0,248 indeks	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2024 realisasinya sebesar 0,248 dan sesuai target tahun 2025
65,50 indeks	64,40 Indeks	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada tahun 2024 realisasinya sebesar 64,40 dan mengalami penurunan sebesar 1,1 dari target tahun 2025
72,85 poin	72,85 poin	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 realisasinya sebesar 72,85 poin dan sesuai target tahun 2025
44,43%	43,26%	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan pada tahun 2024 sebesar 43,26%. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 1,17 poin dari target yang ditetapkan yaitu 44,43%
71,30 indeks	71,10 Indeks	Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Capaian kinerja Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2025 sebesar 71,10 dan masih mengalami penurunan dari target yg ditetapkan sebesar 71,30
73,60 indeks	70,40 indeks	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)		Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) mencapai 70,40 pada tahun 2024 dan mengalami penurunan sebesar 3,2 poin jika dibandingkan target tahun 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	11
E. Sistematika	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	14
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	55
A. Capaian Kinerja Organisasi	57
B. Realisasi Anggaran	96
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	105
BAB IV PENUTUP	119
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	18
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahun 2024	20
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja	22
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan	22
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja	40
Tabel 2.7	Perubahan Program dan Kegiatan	41
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	56
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	58
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	60
Tabel 3.4	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	62
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional	63
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	64
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	68
Tabel 3.8	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	96
Tabel 3.9	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran ..	105
Tabel 3.10	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut DP3AP2KB Kota Cilegon diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi dan Tata Kerja DP3AP2KB Kota Cilegon pada tahun 2025 mengalami perubahan. Periode awal tahun 2025 Struktur Organisasi dan Tata Kerja DP3AP2KB Kota Cilegon mengacu pada Peraturan Daerah Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cilegon dan diperjelas dengan Peraturan Wali Kota Cilegon No. 12 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada DP3AP2KB Kota Cilegon.

Pada tahun 2024 dan Jangka waktu kuartal pertama tahun 2025 terdapat penyesuaian dasar hukum tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cilegon. DP3AP2KB Kota Cilegon mengalami perubahan nomenklatur Dinas. Dasar hukum dimaksud adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cilegon dan Peraturan Wali Kota Cilegon No. 11 Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Dinas Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 dan diperjelas dengan Peraturan Wali Kota Cilegon No. 11 Tahun 2025 menetapkan DP3AP2KB memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

DP3AP2KB mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

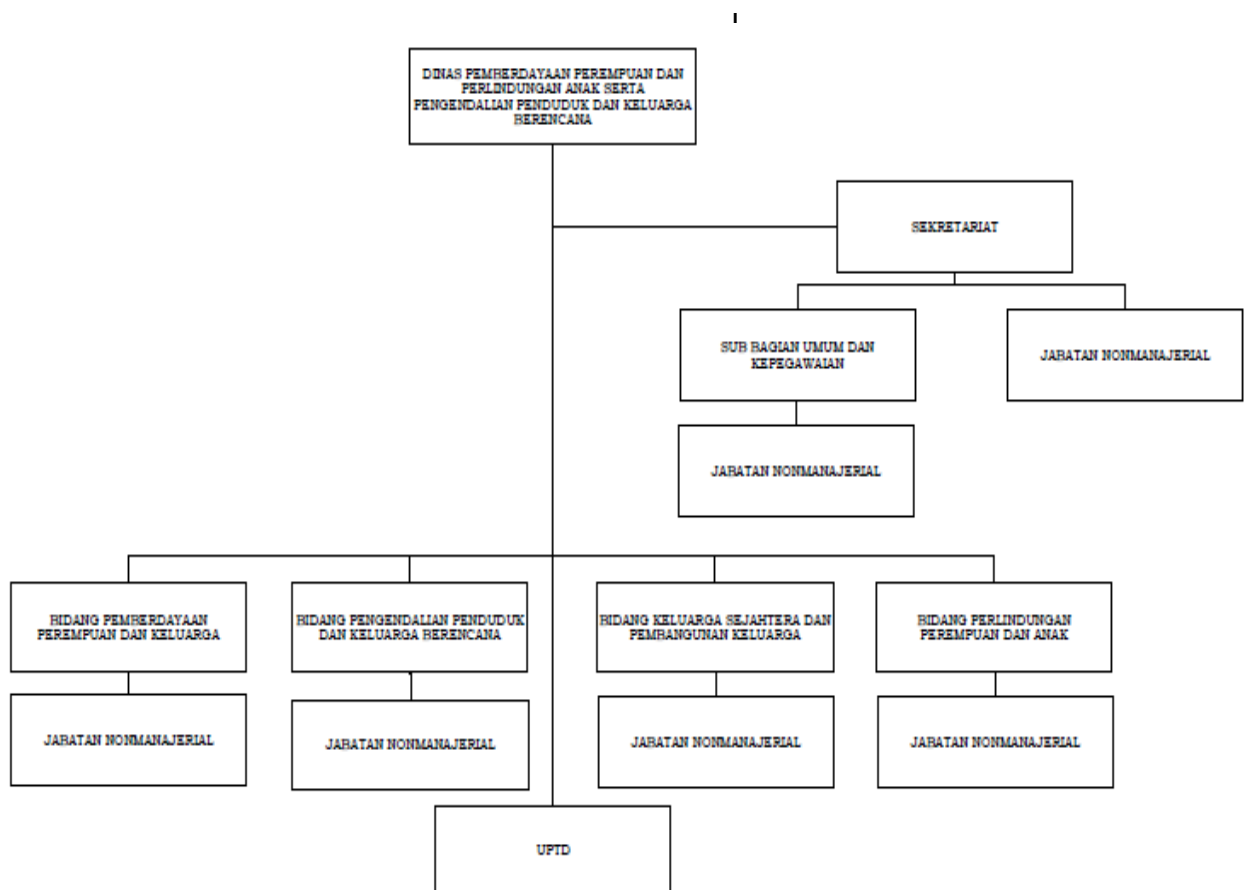
Dalam menjalankan tugasnya DP3AP2KB Kota Cilegon menjalankan fungsi:

- a. Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. Perlindungan perempuan;
- c. Peningkatan kualitas keluarga;
- d. Pengelolaan sistem data gender dan anak;
- e. Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- f. Perlindungan khusus anak;

- g. Pengendalian penduduk;
- h. Pembinaan Keluarga Berencana;
- i. Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera;
- j. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut adalah struktur organisasi DP3AP2KB Kota Cilegon sesuai Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 :

Bagan 1.1
Susunan Organisasi DP3AP2KB Kota Cilegon



1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat Daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Penentuan isu strategis DP3AP2KB Kota Cilegon berdasarkan beberapa telaahan berikut : Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Cilegon periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
2. Belum Optimalnya Perlindungan terhadap Perempuan, Perlindungan terhadap Anak dan belum terpenuhinya hak anak secara komprehensif;
3. Belum optimalnya pemerataan pelayanan KB dan pembangunan keluarga;
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang berdampak terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik dan menghambat program reformasi birokrasi.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada RPJMD Kota Cilegon periode tahun 2025-2029, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya serta Rencana Kerja Tahun 2025. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sesuai bidang urusan yang ditangani oleh DP3AP2KB Kota Cilegon sebagai berikut:

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peran perempuan dalam pembangunan di Kota Cilegon

Upaya mewujudkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peran perempuan di Kota Cilegon dilakukan oleh bidang yang membawahi program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan yang dilakukan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender berupa Diseminasi RAD (Rencana Aksi Daerah) PUG Kota Cilegon tahun 2025 – 2029, Workshop kelembagaan PUG, Percepatan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Evaluasi PUG. Kegiatan lain yaitu Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan berupa Workshop Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) ke organisasi perempuan Kota Cilegon, Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Bidang e-Commerce dan Peringatan Hari Ibu Tingkat Kota Cilegon. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka Penguatan dan Pengembangan LPLPP adalah

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya LPLPP pada organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) tingkat Kecamatan, DWP (Dharma Wanita Persatuan) dan GOW (Gabungan Organisasi Wanita).

- b. Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak di Kota Cilegon.

Upaya mewujudkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak di Kota Cilegon dilakukan oleh bidang yang membawahi program Peningkatan Kualitas Keluarga. Kegiatan yang dilakukan yaitu peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga berupa sosialisasi puspa.

- c. Menjamin pemenuhan hak semua anak secara komprehensif

Upaya mewujudkan pemenuhan hak semua anak secara komprehensif di Kota Cilegon dilakukan oleh bidang yang membawahi program Pemenuhan Hak Anak. Kegiatan yang dilakukan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak berupa peringatan hari anak

- d. Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak

Upaya mewujudkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya

terhadap anak di Kota Cilegon dilakukan oleh bidang yang membawahi program Perlindungan Khusus Anak. Kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan Standar Operasional Pelayanan Integrasi Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pelatihan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak / Pelatihan PATBM.

e. Menurunkan kekerasan terhadap perempuan

Upaya menurunkan kekerasan terhadap perempuan di Kota Cilegon dilakukan oleh bidang yang membawahi program Perlindungan Perempuan. Kegiatan yang dilakukan yaitu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Mengendalikan Pertambahan jumlah penduduk

Upaya mewujudkan pengendalian Pertambahan jumlah penduduk di Kota Cilegon dilakukan oleh bidang yang membawahi program Pengendalian Penduduk. Kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga; Operasional Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga.

b. Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana

Upaya mewujudkan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam

Pembinaan Keluarga Berencana di Kota Cilegon dilakukan oleh bidang yang membawahi program Pembinaan Keluarga Berencana. Kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Operasional dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana; KEGIATAN MINI LOKAKARYA (MINILOK); Pelaksanaan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang; Kegiatan IMP Bangsa Kencana Dan Sub IMP Bangsa Kencana (DAK) Serta Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan (Poktan) DAK; Distribusi Alokon Dan Non Alokon; Pelayanan KB IUD, Implant, Cabut Implant dan MOW; Pembinaan Pelayanan KB di Faskes (DAK); Pembinaan dan Evaluasi Fasilitas Kesehatan KB (APBD); Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas.

c. Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera

Upaya mewujudkan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera di Kota Cilegon dilakukan oleh bidang yang membawahi program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera. Kegiatan yang dilakukan yaitu Pengadaan BKB Kit Stunting; Kegiatan Adujak GenRe; Pencatatan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting; Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting.

Sedangkan Identifikasi isu strategis terkait dinamika organisasi dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia;

Jumlah SDM yang terbatas akan mengurangi optimalisasi tupoksi dari struktur organisasi DP3AP2KB sehingga perhitungan jumlah SDM yang akurat sesuai analisis jabatan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pegawai di DP3AP2KB. Kualitas dan Kompetensi SDM yang terbatas sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga pendidikan dan latihan untuk mengembangkan kompetensi pegawai menjadi sebuah keharusan dengan dibuatnya rencana kebutuhan pengembangan pegawai. Jumlah Pegawai berdasarkan Peta Jabatan dan Penempatan terlampir.

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung;

Sarana dan Prasarana yang memadai sangat menunjang keberlangsungan kegiatan operasional organisasi. Sarana dan prasarana yang terdapat di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikelola oleh bagian asset DP3AP2KB. Ketersediaan asset pada tahun 2025 terlampir.

3. Ketersediaan Alokasi Anggaran;

Alokasi anggaran yang memadai sangat menunjang kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Alokasi anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 28.994.614.552,-

4. Pengembangan Organisasi.

Adanya pengembangan organisasi disesuaikan dengan perkembangan kelembagaan yang sangat dinamis. Saat ini kelembagaan DP3AP2KB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor

11 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Daerah.

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 7);
6. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

8. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 40).

1.5 Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Isu Strategis Perangkat Daerah, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Simpulan dan Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DP3AP2KB Kota Cilegon. Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Cilegon untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Cilegon dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah bersama Bappeda Kota Cilegon, sehingga Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon

merupakan hasil kesepakatan bersama antara DP3AP2KB Kota Cilegon dan *stakeholders*.

Selanjutnya, Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Cilegon yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja DP3AP2KB Kota Cilegon dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kota Cilegon.

Visi Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2025-2029 adalah:

“Mewujudkan Cilegon yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Dengan menjunjung tinggi filosofi Kota Cilegon “**JUARE**” (**Jujur, Amanah, dan Religius**), setiap langkah dan kebijakan yang diambil senantiasa diarahkan untuk mencerminkan nilai-nilai luhur tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Filosofi ini menjadi landasan moral dan etika dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2025-2029 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi seluruh penduduk Cilegon

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha melalui pembangunan ekonomi yang inklusif

Misi 3 : Meningkatkan akses layanan kesehatan yang inklusif, berkualitas dan terjangkau

Misi 4 : Mewujudkan transformasi digital pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif

Misi 5 : Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan melestarikan lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan

Misi 6 : Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan sosial masyarakat

Berdasarkan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana maka perumusan tujuan dan sasaran DP3AP2KB Kota Cilegon mengacu pada Misi ke-1, Misi ke-3 dan Misi ke-6, yaitu :

Misi 1 : Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas dengan program pembangunan yang dilaksanakan yaitu PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA, PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK, PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Misi 3 : Meningkatkan akses layanan kesehatan yang inklusif, berkualitas dan terjangkau dengan program pembangunan yang dilaksanakan yaitu PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Misi 6 : Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan sosial masyarakat dengan program pembangunan yang dilaksanakan yaitu PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK, PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK, PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Cilegon Tahun 2025-2029 sebanyak 6 (Enam) tujuan dan 20 (Duapuluh) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DP3AP2KB Kota Cilegon sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak Dan Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.248	0.247	0.246	0.244	0.242	0.240	
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65.50	66.60	67.70	68.90	70.10	71.30	
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71.30	71.70	72.10	72.50	72.90	73.30	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	44.43	45.34	46.38	47.42	48.46	49.50	
	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	73.60	76.90	80.50	84.10	88	90	
	Terwujudnya Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72.85	74.00	75.15	76.30	77.45	78.60	

Sumber : Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon periode 2025-2029

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan

Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kota Cilegon tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN												
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA										
1.	TUJUAN : Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak Dan Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas	1.1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan	<div><p>Langkah-langkah untuk penghitungan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah sebagai berikut:</p><ol style="list-style-type: none">Menghitung Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dengan rumus: $IKG = \frac{1}{2} \left(\frac{MTF}{MTF + MHPK20} + \frac{TPAK}{TPAK + TPAK} \right)$Menghitung persentase indeks ketimpangan dan indeks laki-laki: $IKG_{Laki} = \frac{1}{2} \left(\frac{MTF}{MTF + MHPK20} + \frac{TPAK}{TPAK + TPAK} \right)$Menghitung indeks masing-masing dimensi: $IKG_{Laki} = \frac{1}{2} \left(\frac{MTF}{MTF + MHPK20} + \frac{TPAK}{TPAK + TPAK} \right)$Menghitung indeks masing-masing dimensi: $IKG_{Laki} = \frac{1}{2} \left(\frac{MTF}{MTF + MHPK20} + \frac{TPAK}{TPAK + TPAK} \right)$Menghitung Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dengan rumus: $IKG = \frac{1}{2} \left(\frac{MTF}{MTF + MHPK20} + \frac{TPAK}{TPAK + TPAK} \right)$Menghitung Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dengan rumus: $IKG = \frac{1}{2} \left(\frac{MTF}{MTF + MHPK20} + \frac{TPAK}{TPAK + TPAK} \right)$</div>	BPS Kota Cilegon Tahun 2025										
		1.2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	Suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran an fungsi keluarga	iBangga = 1/3 (indeks ketentraman + indeks kemandirian + indeks kebahagiaan) x 100%	BKKBN Pusat										
2.	SASARAN : Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	2.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas	<div>$TPAK = \frac{PA}{P_{15+}} \times 100\%$<p>Keterangan:</p><p>TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)</p><p>PA = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)</p><p>P₁₅₊ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)</p></div>	BPS Kota Cilegon Tahun 2025										
		2.2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	Ukuran yang dicapai dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Kementerian PPPA)	<div><p>Metode Perhitungan</p><p>Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat perlindungan anak yang didasarkan pada lima indikator berikut:</p><table><thead><tr><th>Indikator</th><th>Bobot</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Hak Sipil dan Kelembagaan</td><td>20%</td></tr><tr><td>2. Lingkungan Keluarga dan Pengawasan Masyarakat</td><td>20%</td></tr><tr><td>3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</td><td>20%</td></tr><tr><td>4. Pendidikan, Penguatan Nilai-nilai, dan Kegiatan Budaya</td><td>20%</td></tr><tr><td>5. Perlindungan Khusus</td><td>20%</td></tr></tbody></table><p>Perhitungan yang digunakan untuk memperoleh indeks IPA adalah sebagai berikut:</p>$Indeks IPA = \left(\frac{\sum_{i=1}^5 (X_i \times B_i)}{5} \right) \times 100$<p>Keterangan:</p><p>Indeks IPA = nilai indeks IPA</p><p>X_i = nilai indikator ke-1 pada indikator ke-1 yang telah dinormalisasi</p><p>B_i = bobot indikator ke-1 pada indikator ke-1</p><p>Keterangan: nilai IPA diperoleh dengan mengalikan bobot indikator dengan indeks indikator. Perhitungan yang digunakan untuk memperoleh IPA adalah sebagai berikut:</p>$\sum_{i=1}^5 (X_i \times B_i) = \text{Indeks IPA}$</div>	Indikator	Bobot	1. Hak Sipil dan Kelembagaan	20%	2. Lingkungan Keluarga dan Pengawasan Masyarakat	20%	3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	20%	4. Pendidikan, Penguatan Nilai-nilai, dan Kegiatan Budaya	20%	5. Perlindungan Khusus
Indikator	Bobot																
1. Hak Sipil dan Kelembagaan	20%																
2. Lingkungan Keluarga dan Pengawasan Masyarakat	20%																
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	20%																
4. Pendidikan, Penguatan Nilai-nilai, dan Kegiatan Budaya	20%																
5. Perlindungan Khusus	20%																
	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	2.3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah indeks komposit yg merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sbg alat ukur dlm memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia.	<div>$IPBK = (D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5)^{\frac{1}{5}}$</div>	BKKBN Pusat										

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Terwujudnya Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	2.4	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Ukuran kemajuan dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu instansi pemerintah	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60%, hasil 40%	LHE PMPRB DP3AP2KB Tahun 2023

Sumber : Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82,2
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesional Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	68,18
			Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	72,85
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	90,63
2	Peningkatan Kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat		Indeks Perlindungan Anak	Indeks	70,88
			Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86,66

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga	Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk	Persen	1,5
			Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Per 100.000	30
			Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	Persen	100
			Presentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya	Persen	45

Sumber : Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Cilegon tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan indikator Kinerja DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026, dokumen Renja Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tahun 2025 ditetapkan Indikator Kinerja Kepala DP3AP2KB Kota Cilegon dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	68,18
		Indeks RB Perangkat Daerah	Indeks	72,85
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,63
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga	Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk	Persen	1,5
		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	Per 100.000	30
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	Persen	100
		Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya	Persen	45

Sumber : Indikator Kinerja DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan DPA yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan DP3AP2KB Kota Cilegon :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			33.872.296.975
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			33.139.582.243
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			17.292.245.703

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			17.292.245.703
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.139.076.878
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	68.18 Poin	
		Indeks RB Perangkat Daerah	72.85 Poin	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	90.63 Poin	
		Indeks Pelayanan Publik	1.97 Poin	
		Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah	55.0 Skor	
		Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan	81.0 %	
		Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah	3.0 Skor	
		Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	75.0 Skor	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68.18 Poin	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		193.915.368
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			125.551.000
		Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun	1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun	1 Dokumen	
		Dokumen Manajemen Risiko yang disusun	4 Dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Perubahan yang disusun	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			7.996.000
		Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun	1 Dokumen	
		Jumlah dokumen perencanaan anggaran perubahan yang disusun	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			7.713.024
		Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun	1 Dokumen	
		Jumlah dokumen perencanaan anggaran Perubahan yang disusun	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			18.911.008
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja	2 Laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			33.744.336

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun	1 Laporan	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disusun	1 Laporan	
		Jumlah Laporan Evaluasi Renja-PD Triwulanan	4 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.788.722.678
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.720.926.678
		Jumlah Orang dan Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 orang/Bulan	
		Jumlah Pelayanan Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN (Prioritas Daerah)	560 orang/bulan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			51.133.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.401.000
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			7.294.000
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Dokumen	
		Jumlah Laporan Keuangan Semester I SKPD	4 Dokumen	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			3.968.000
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		26,400,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			26,400,000
		Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		410.711.735
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.767.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			48.817.035
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			35.010.000
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya / Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			121.368.000
		Belanja Natura dan Pakan-Natura / Belanja Makanan dan Minuman Rapat /	1 paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			66.688.700
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor/Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			58.160.000
		Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4 Dokumen	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			59.901.000
		Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4 Laporan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.010.874.618
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5,000,000
		Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			141.843.158
		Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			753.720.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Dekorasi Stand)	1 Laporan	
		Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (SEWA KENDARAAN ESELON II)	1 Unit	
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (Eselon III (1500 CC))	1 Unit	
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor UPTD PPA Dan Gudang alkon	2 Unit	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.110.311.460
		Pemberian Honorarium tenaga administrasi	312 Orang	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan ,	120 Orang	
		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	106 Tayang	
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	804 Orang	
		Pemberian Honorarium Instruktur Senam	96 Orang	
		Pemberian Honorarium Rohaniawan	48 Orang	
		Pemberian Honorarium Tenaga Operator Komputer	300 Orang	
		Pemberian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	804 Orang	
		Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24 orang/Bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		708.452.479
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			128.626.600
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			405.661.750
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			174.164.129
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 unit	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			1.506.069.000
		Persentase OPD yang melaksanakan Anggaran Responsif Gender	60.0 %	
		Presentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya	45.0 %	
		Persentase Anggota Organisasi Perempuan yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program	100.0 %	
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	5.0 %	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		60.593.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota			60.593.000
		Jumlah SDM yang Memperoleh Pendampingan Penyelenggaraan PUG dan Mengikuti Pelatihan Percepatan Anggaran Responsif Gender (ARG)	72 Orang	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		241.928.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			241.928.000
		Jumlah peserta acara Peringatan Hari Ibu	40 Organisasi	
		Jumlah organisasi yang mengikuti Pembinaan LPLPP Ke Organisasi Perempuan Kota Cilegon	40 Organisasi	
		Jumlah peserta acara Peringatan Hari Kartini	0 Organisasi	
		Jumlah organisasi yang mengikuti Workshop Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik	40 Organisasi	
		Jumlah peserta Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Bidang E-commerce	40 Organisasi	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1.203.548.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			1.203.548.000
		Jumlah SDM yang mengikuti Puncak HUT DWP Kota Cilegon	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Seminar Sehari DWP Kota Cilegon	80 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Bidang Ekonomi	80 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Bidang Pendidikan	80 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Anggota DWP Kota Cilegon	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Bidang Sosial dan Budaya	80 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kapasitas DWP Kota Cilegon	150 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Rapat Kerja DWP Kota Cilegon	150 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Bakti Sosial DWP Kota Cilegon	0 Orang	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Jumlah SDM yang mengikuti Rapat Pengurus GOW	25 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus GOW Kota Cilegon 2025-2029	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Wanita	60 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Organisasi Wanita	20 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Bakti Sosial GOW	0 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kualitas Pendidikan Organisasi Wanita	60 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Rapat Kerja GOW	50 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Rapat Pimpinan GOW	50 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Musyawarah Daerah GOW Kota Cilegon	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Organisasi wanita	35 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Sinergitas Organisasi Dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender	110 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pengajian Rutin DWP Kota Cilegon	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pertemuan Rutin PKK Kota Cilegon	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pengajian Rutin PKK Kota Cilegon	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Dasa Wisma PKK Kota Cilegon	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Peduli Stunting PKK Kota Cilegon	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Bank Sampah (PKK)	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pembekalan Sekretaris PKK	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Karakter Melalui PAAR (PKK)	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan UP2K (PKK)	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Sex dan Sex Bebas (PKK)	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Puncak HKG PKK Kota Cilegon	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi Koperasi dan Adm Galeri Pelangi (PKK)	51 Orang	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi Pemanfaatan Pangan Lokal (PKK)	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Bakti Sosial PKK	0 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Capacity Building Ketua TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Cilegon	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB)	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan TP.PKK Tingkat Kecamatan Se-Kota Cilegon	50 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Sarasehan Perlindungan Perempuan dan Anak (KRPPA)	50 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Rapat Koordinasi TP.PKK Kecamatan dan TP.PKK Kelurahan	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pertemuan Rutin DWP Kota Cilegon	100 Orang	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			138.720.000
		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	30.0 per 100.000 penduduk	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100.0 %	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		92.605.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			92.605.000
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan dari TPPO dan PKDRT	36 Perangkat Daerah	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		46.115.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			46.115.000
		Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Kasus	40 Orang	
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			361.306.900
		Persentase Keluarga Binaan yang Meningkatkan Kualitasnya	90.0 %	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0.0 Indeks	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		261.303.900
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			261.303.900
		Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100.003.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.003.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	800 Orang	
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			48.045.000
		Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	100.0 %	
		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	100.0 %	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		48.045.000
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			48.045.000
		Updating Website Data Gender dan Anak	1 dokumen	
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			469.377.000
		Persentase Pencapaian 24 Indikator Kota Layak Anak	5.0 %	
		Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif dan sesuai standar (%)	35.0 Persen	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		285.554.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			285.554.000
		Hari Anak Nasional	1 dokumen	
		Pemilihan Duta Anak	1 Dokumen	
		Gugus Tugas KLA	1 Dokumen	
		Penghargaan KLA	1 Dokumen	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		183.823.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			163.827.000
		Pelatihan Sekolah Ramah Anak	40 Sekolah	
		Workshop Aplikasi KLA	200 Orang	
		Pelatihan KHA bagi Tenaga Kesehatan	50 Orang	
		Pembinaan Pondok Pesantren Ramah Anak	25 Pondok Pesantren	
		Koordinasi Pembinaan Forum Anak Nasional	60 Orang	
		Rapat rutin Forum Anak	5 Kegiatan	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			19.996.000
		Kota Layak Anak	1 dokumen	
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			629.650.925
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	100.0 %	
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100.0 Persen	
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100.0 Persentase	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		217.031.000
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			130.000.000
		Penyusunan Standar Operasional Pelayanan Integrasi Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Dokumen	
		Sosialisasi Pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak bagi Siswa Sekolah Dasar	1,000 Orang	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Sosialisasi Pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama	1,250 Orang	
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota			87.031.000
		Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	3 Kegiatan	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		181.573.440
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			181.573.440
		Pembinaan Pelayanan Pencegahan Kejahatan Seksual Anak di Kab/Kota	1 Kegiatan	
		Sosialisasi GN-AKSA (Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak) di Kab/Kota	1 Kegiatan	
		KRPPA Kota Cilegon	4 Kegiatan	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		231.046.485
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/			88.400.000
		Pelatihan Pendampingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	40 Orang	
	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota			142.646.485
		Pelatihan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak / Pelatihan PATBM	52 orang	
		Lomba PATBM	1 Kegiatan	
		Bantuan Alat Edukasi bagi AMPK	6 Sekolah	
		Bimtek SPPA	70 Orang	
		Monev PATBM	43 Kelurahan	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			15.847.336.540
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			15.847.336.540
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			165.189.000
		Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk	1.5 %	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		TFR (Angka Kelahiran Total)	2.08 Jiwa	
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	8.0 Kelahiran per 1000 WUS 15-19	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		17.989.000
	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan			17.989.000
		Kegiatan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	0 Orang	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		147.200.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			59.000.000
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	172 Orang	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			88.200.000
		Operasional Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	796 Orang	
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			12.255.898.540
		Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja dalam Pemenuhan Kebutuhan Ber-KB	100.0 %	
		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	69.2 %	
		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	14.5 %	
		Proporsi Kampung KB Mandiri	63.2 %	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		1.619.334.540
	Pengendalian Program KKBPK			439.385.270
		Pelayanan KB IUD, Implant, Cabut Implant dan MOW	0 orang	
		Parenting dan Edukasi Stunting Bagi Keluarga Beresiko Stunting	0 laporan	
		Sosialisasi dan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	0 sekolah	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Penyuluhan dan Edukasi Sekolah Siaga Kependudukan	0 sekolah	
		Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan	0 sekolah	
		Evaluasi Sekolah Siaga Kependudukan	0 sekolah	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana			403.330.000
		Pengelolaan Operasional dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	3 Laporan	
		Pengelolaan Operasional dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	0 Laporan	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			160.000.000
		KEGIATAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	8 Laporan	
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			100.000.000
		Pelaksanaan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Media	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			316.619.270
		Kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	0 Dokumen	
	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			200.000.00
		Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)	12 laporan	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		9.899.774.000
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			9.770.774.000
		Honor Kader Cilegon Mandiri (KCM) serta Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi KCM	31,800 orang/Bulan	
	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			129.000.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Kegiatan IMP Bangga Kencana Dan Sub IMP Bangga Kencana (DAK) Serta Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan (Poktan) DAK	1,290 Orang/Bulan	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		492.296.000
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			46.800.000
		Distribusi Alokasi Dan Non Alokasi	12 Bulan	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			361.250.000
		Pelayanan KB IUD, Implant, Cabut Implant dan MOW	1,175 Orang	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			84.246.000
		Pembinaan Pelayanan KB di Faskes (DAK)	7 Kegiatan	
		Pembinaan dan Evaluasi Fasilitas Kesehatan KB (APBD)	5 Kegiatan	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		244.494.000
	Pembinaan Terpadu Kampung KB			138.094.000
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	0 Laporan	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			106.400.000
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	20 Kampung	
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			3.426.249.000
		Persentase Anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKA/UPPKS yang ber-KB	87.6 %	
		Indeks Lansia Berdaya	57.0 Indeks	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Indeks Pengasuhan Remaja	87.7 Indeks	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		3.386.387.000
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			130.000.000
		Pengadaan BKB Kit Stunting	10 Unit	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			569.483.000
		Kegiatan Adujak GenRe	480 Orang	
		Kegiatan Sosialisasi Kampung Digital Pada Remaja GenRe	0 Orang	
		Kegiatan Pembinaan Tim Pendamping Keluarga	0 Orang	
		Kegiatan Evaluasi Tim Pendamping Keluarga	0 Orang	
	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			245.280.000
		Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Orang	
		Evaluasi Program Bangga Kencana	0 Orang	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			43.543.000
		Kegiatan Tribina dan UPPKA	0 Laporan	
	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			98.130.000
		Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Orang	
	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga			5.460.000
		Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	0 Dokumen	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			2.211.500.000
		Pencatatan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	139,632 Orang	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	139,632 Orang	
		Dukungan Output DAK Non Fisik	0 Kegiatan	
	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			6.510.000
		Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Laporan	
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			76.481.000
		KEGIATAN PEMBINAAN SEKOLAH LANSIA	0 Kelompok	
		KEGIATAN UPPKA	0 Kelompok	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		39.862.000
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			39.862.000
		Kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)	0 Organisasi	
		KEGIATAN SAKA KENCANA PRAMUKA	0 Organisasi	
	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK			732.714.732
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			45,123,000
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	68.18 Poin	
		Indeks RB Perangkat Daerah	72.85 Poin	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	90.63 Poin	
		Indeks Pelayanan Publik	1.97 Poin	
		Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah	55.0 Skor	
		Persentase BMD dalam kondisi baik dan dimanfaatkan	81.0 %	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah	3.0 Skor	
		Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	75.0 Skor	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68.18 Poin	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		45,123,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			45,123,000
		laporan Penyediaan Tagihan Telepon,Air, Listrik, Internet	12 laporan	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			482.942.000
		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	30.0 per 100.000 penduduk	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100.0 %	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		482.942.000
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			252.942.000
		melaksanakan Pendampingan Yang dilaksanakan pada pelayanan yang diberikan kepada perempuan yang mengalami kekerasan	40 Orang	
		melaksanakan Pendampingan Home Visit yang dilaksanakan pada korban perempuan yang mengalami kekerasan	40 Orang	
		melaksanakan Pelayanan Konsultasi dan pendampingan Rohaniawan pada perempuan korban yang mengalami kekerasan	40 orang	
		melaksanakan Pelayanan Konsultasi dan pendampingan Psikolog pada perempuan korban yang mengalami kekerasan	40 orang	
		melaksanakan Pelayanan Konsultasi dan pendampingan Hukum pada perempuan korban kekerasan	40 orang	
		melaksanakan pertemuan koordinasi penanganan kasus perempuan korban kekerasan	6 Bulan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			230.000.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		melaksanakan Pendampingan Yang dilaksanakan untuk korban kekerasan	40 layanan	
		melaksanakan layanan Rawat Inap yang diberikan kepada korban kekerasan perempuan	1 layanan	
		Melaksanakan pelayanan Tenaga Ahli bagi perempuan korban kekerasan	5 layanan	
		melaksanakan pelayanan rumah perlindungan Sementara bagi perempuan korban kekerasan	5 layanan	
		melaksanakan home visit yang dilaksanakan untuk perempuan korban kekerasan	40 layanan	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			204.649.732
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	100.0 %	
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100.0 Persen	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		204.649.732
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			147.359.732
		melaksanakan pelayanan Biaya Rawat inap Korban kekerasan pada anak	1 orang	
		melaksanakan pelayanan Biaya Rawat Jalan Korban kekerasan pada anak	30 orang	
		melaksanakan Pendampingan home visit anak korban kekerasan	60 orang	
		melaksanakan pendampingan pada anak korban kekerasan	60 orang	
		melaksanakan kegiatan Psiko Edukasi untuk anak korban kekerasan	0 Orang	
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			57.290.000
		melaksanakan pelayanan rawat inap yang diberikan kepada masyarakat bagi korban kekerasan anak	1 Orang	
		Melaksanakan Pelayanan pendampingan bagi korban kekerasan anak	25 Orang	
		Melaksanakan Pelayanan Pendampingan home visit bagi korban kekerasan anak	25 Orang	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2025 dilaksanakan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan adanya Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) sesuai Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon
Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak Dan Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.248
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65.50
2	Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71.30
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	44.43
3	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	73.60
4	Terwujudnya Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	72.85

Sumber : Perjanjian Kinerja DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Cilegon Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			28,994,614,552
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			28,417,071,552
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			14,937,835,552
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			14,937,835,552
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13,069,287,167
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	68.18 Poin	
		Indeks RB Perangkat Daerah	72.85 Poin	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	90.63 Poin	
		Indeks Pelayanan Publik	1.97 Poin	
		Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah	55.0 Skor	
		Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan	81.0 %	
		Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah	3.0 Skor	
		Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	75.0 Skor	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68.18 Poin	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		41,731,100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15,314,700
		Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun	1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun	1 Dokumen	
		Dokumen Manajemen Risiko yang disusun	4 Dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Perubahan yang disusun	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4,980,700
		Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun	1 Dokumen	
		Jumlah dokumen perencanaan anggaran perubahan yang disusun	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			4,660,800
		Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun	1 Dokumen	
		Jumlah dokumen perencanaan anggaran Perubahan yang disusun	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7,164,800

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja	2 Laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9,610,100
		Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun	1 Laporan	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disusun	1 Laporan	
		Jumlah Laporan Evaluasi Renja-PD Triwulanan	4 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8,693,638,052
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8,646,395,052
		Jumlah Orang dan Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 orang/Bulan	
		Jumlah Pelayanan Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN (Prioritas Daerah)	560 orang/bulan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			39,838,000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			180,000
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			4,774,000
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Dokumen	
		Jumlah Laporan Keuangan Semester I SKPD	4 Dokumen	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2,451,000
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		26,400,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			26,400,000
		Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		330,580,416
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20,767,000
		Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			48,817,000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			35,010,000
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya / Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			121,368,000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Belanja Natura dan Pakan-Natura / Belanja Makanan dan Minuman Rapat /	1 paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			63,722,416
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor/Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			11,000,000
		Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4 Dokumen	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			29,896,000
		Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4 Laporan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,610,334,249
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5,000,000
		Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			102,576,158
		Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			723,720,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Dekorasi Stand)	1 Laporan	
		Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (SEWA KENDARAAN ESELON II)	1 Unit	
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (Eselon III (1500 CC))	1 Unit	
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor UPTD PPA Dan Gudang alkon	2 Unit	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2,779,038,091
		Pemberian Honorarium tenaga administrasi	312 Orang	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan ,	120 Orang	
		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	106 Tayang	
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	804 Orang	
		Pemberian Honorarium Instruktur Senam	96 Orang	
		Pemberian Honorarium Rohaniawan	48 Orang	
		Pemberian Honorarium Tenaga Operator Komputer	300 Orang	
		Pemberian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	804 Orang	
		Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24 orang/Bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		366,603,350
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			91,866,600
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			239,021,750

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			35,715,000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 unit	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			1,237,963,000
		Persentase OPD yang melaksanakan Anggaran Responsif Gender	60.0 %	
		Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya	45.0 %	
		Persentase Anggota Organisasi Perempuan yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program	100.0 %	
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	5.0 %	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		59,593,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota			59,593,000
		Jumlah SDM yang Memperoleh Pendampingan Penyelenggaraan PUG dan Mengikuti Pelatihan Percepatan Anggaran Responsif Gender (ARG)	72 Orang	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		147,916,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			147,916,000
		Jumlah peserta acara Peringatan Hari Ibu	40 Organisasi	
		Jumlah organisasi yang mengikuti Pembinaan LPLPP Ke Organisasi Perempuan Kota Cilegon	40 Organisasi	
		Jumlah peserta acara Peringatan Hari Kartini	0 Organisasi	
		Jumlah organisasi yang mengikuti Workshop Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik	40 Organisasi	
		Jumlah peserta Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Bidang E-commerce	40 Organisasi	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1,030,454,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			1,030,454,000
		Jumlah SDM yang mengikuti Puncak HUT DWP Kota Cilegon	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Seminar Sehari DWP Kota Cilegon	80 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Bidang Ekonomi	80 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Bidang Pendidikan	80 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Anggota DWP Kota Cilegon	100 Orang	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Bidang Sosial dan Budaya	80 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kapasitas DWP Kota Cilegon	150 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Rapat Kerja DWP Kota Cilegon	150 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Bakti Sosial DWP Kota Cilegon	0 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Rapat Pengurus GOW	25 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus GOW Kota Cilegon 2025-2029	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Wanita	60 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Organisasi Wanita	20 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Bakti Sosial GOW	0 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kualitas Pendidikan Organisasi Wanita	60 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Rapat Kerja GOW	50 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Rapat Pimpinan GOW	50 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Musyawarah Daerah GOW Kota Cilegon	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Organisasi wanita	35 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Sinergitas Organisasi Dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender	110 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pengajian Rutin DWP Kota Cilegon	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pertemuan Rutin PKK Kota Cilegon	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pengajian Rutin PKK Kota Cilegon	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Dasa Wisma PKK Kota Cilegon	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Peduli Stunting PKK Kota Cilegon	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Bank Sampah (PKK)	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pembekalan Sekretaris PKK	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Karakter Melalui PAAR (PKK)	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan UP2K (PKK)	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Sex dan Sex Bebas (PKK)	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Puncak HKG PKK Kota Cilegon	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi Koperasi dan Adm Galeri Pelangi (PKK)	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi Pemanfaatan Pangan Lokal (PKK)	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Bakti Sosial PKK	0 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Capacity Building Ketua TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Cilegon	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB)	51 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan TP.PKK Tingkat Kecamatan Se-Kota Cilegon	50 Orang	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Jumlah SDM yang mengikuti Sarasehan Perlindungan Perempuan dan Anak (KRPPA)	50 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Rapat Koordinasi TP.PKK Kecamatan dan TP.PKK Kelurahan	100 Orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti Pertemuan Rutin DWP Kota Cilegon	100 Orang	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			121,920,000
		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	30.0 per 100.000 penduduk	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100.0 %	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		77,805,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			77,805,000
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan dari TPPO dan PKDRT	36 Perangkat Daerah	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		44,115,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			44,115,000
		Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Kasus	40 Orang	
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			257,771,900
		Persentase Keluarga Binaan yang Meningkatkan Kualitasnya	90.0 %	
		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0.0 Indeks	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kestaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kestaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		177,568,900
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			177,568,900
		Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		80,203,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80,203,000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	800 Orang	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			0
		Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	100.0 %	
		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	100.0 %	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			0
		Updating Website Data Gender dan Anak	1 dokumen	
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			14,642,000
		Persentase Pencapaian 24 Indikator Kota Layak Anak	5.0 %	
		Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif dan sesuai standar (%)	35.0 Persen	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		11,700,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			11,700,000
		Hari Anak Nasional	1 dokumen	
		Pemilihan Duta Anak	1 Dokumen	
		Gugus Tugas KLA	1 Dokumen	
		Penghargaan KLA	1 Dokumen	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		2,942,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2,942,000
		Pelatihan Sekolah Ramah Anak	40 Sekolah	
		Workshop Aplikasi KLA	200 Orang	
		Pelatihan KHA bagi Tenaga Kesehatan	50 Orang	
		Pembinaan Pondok Pesantren Ramah Anak	25 Pondok Pesantren	
		Koordinasi Pembinaan Forum Anak Nasional	60 Orang	
		Rapat rutin Forum Anak	5 Kegiatan	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0
		Kota Layak Anak	1 dokumen	
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			236,251,485
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	100.0 %	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100.0 Persen	
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100.0 Persentase	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		132,940,000
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			130,000,000
		Penyusunan Standar Operasional Pelayanan Integrasi Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Dokumen	
		Sosialisasi Pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak bagi Siswa Sekolah Dasar	1,000 Orang	
		Sosialisasi Pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama	1,250 Orang	
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota			2,940,000
		Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	3 Kegiatan	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			0
		Pembinaan Pelayanan Pencegahan Kejahatan Seksual Anak di Kab/Kota	1 Kegiatan	
		Sosialisasi GN-AKSA (Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak) di Kab/Kota	1 Kegiatan	
		KRPPA Kota Cilegon	4 Kegiatan	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		103,311,485
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/			88,400,000
		Pelatihan Pendampingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	40 Orang	
	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota			14,911,485
		Pelatihan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak / Pelatihan PATBM	52 orang	
		Lomba PATBM	1 Kegiatan	
		Bantuan Alat Edukasi bagi AMPK	6 Sekolah	
		Bimtek SPPA	70 Orang	
		Monev PATBM	43 Kelurahan	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			13,479,236,000
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			13,479,236,000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			147,200,000
		Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk	1.5 %	
		TFR (Angka Kelahiran Total)	2.08 Jiwa	
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	8.0 Kelahiran per 1000 WUS 15-19	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		0
	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan			0
		Kegiatan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	0 Orang	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		147,200,000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			59,000,000
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	172 Orang	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			88,200,000
		Operasional Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	796 Orang	
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			10,919,796,000
		Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja dalam Pemenuhan Kebutuhan Ber-KB	100.0 %	
		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	69.2 %	
		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	14.5 %	
		Proporsi Kampung KB Mandiri	63.2 %	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		543,600,000
	Pengendalian Program KKBPK			0
		Pelayanan KB IUD, Implant, Cabut Implant dan MOW	0 orang	
		Parenting dan Edukasi Stunting Bagi Keluarga Beresiko Stunting	0 laporan	
		Sosialisasi dan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	0 sekolah	
		Penyuluhan dan Edukasi Sekolah Siaga Kependudukan	0 sekolah	
		Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan	0 sekolah	
		Evaluasi Sekolah Siaga Kependudukan	0 sekolah	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana			83,600,000
		Pengelolaan Operasional dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	3 Laporan	
		Pengelolaan Operasional dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	0 Laporan	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi			160,000,000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
		KEGIATAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	8 Laporan	
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			100,000,000
		Pelaksanaan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Media	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			0
		Kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	0 Dokumen	
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			200,000,000
		Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)	12 laporan	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		9,827,550,000
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			9,698,550,000
		Honor Kader Cilegon Mandiri (KCM) serta Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi KCM	31,800 orang/Bulan	
	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			129,000,000
		Kegiatan IMP Bangga Kencana Dan Sub IMP Bangga Kencana (DAK) Serta Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan (Poktan) DAK	1,290 Orang/Bulan	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		442,246,000
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			46,800,000
		Distribusi Alokasi Dan Non Alokasi	12 Bulan	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			361,250,000
		Pelayanan KB IUD, Implant, Cabut Implant dan MOW	1,175 Orang	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			34,196,000
		Pembinaan Pelayanan KB di Faskes (DAK)	7 Kegiatan	
		Pembinaan dan Evaluasi Fasilitas Kesehatan KB (APBD)	5 Kegiatan	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		106,400,000
	Pembinaan Terpadu Kampung KB			0

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	0 Laporan	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			106,400,000
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	20 Kampung	
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			2,412,240,000
		Persentase Anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKA/UPPKS yang ber-KB	87.6 %	
		Indeks Lansia Berdaya	57.0 Indeks	
		Indeks Pengasuhan Remaja	87.7 Indeks	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		2,412,240,000
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			130,000,000
		Pengadaan BKB Kit Stunting	10 Unit	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			70,183,000
		Kegiatan Adujak GenRe	480 Orang	
		Kegiatan Sosialisasi Kampung Digital Pada Remaja GenRe	0 Orang	
		Kegiatan Pembinaan Tim Pendamping Keluarga	0 Orang	
		Kegiatan Evaluasi Tim Pendamping Keluarga	0 Orang	
	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			0
		Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Orang	
		Evaluasi Program Bangga Kencana	0 Orang	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			0
		Kegiatan Tribina dan UPPKA	0 Laporan	
	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			0
		Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Orang	
	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga			0
		Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	0 Dokumen	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			2,211,000,000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Pencatatan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	139,632 Orang	
		Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	139,632 Orang	
		Dukungan Output DAK Non Fisik	0 Kegiatan	
	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			0
		Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Laporan	
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			1,057,000
		KEGIATAN PEMBINAAN SEKOLAH LANSIA	0 Kelompok	
		KEGIATAN UPPKA	0 Kelompok	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		0
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			0
		Kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)	0 Organisasi	
		KEGIATAN SAKA KENCANA PRAMUKA	0 Organisasi	
	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK			577,543,000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			45,123,000
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	68.18 Poin	
		Indeks RB Perangkat Daerah	72.85 Poin	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	90.63 Poin	
		Indeks Pelayanan Publik	1.97 Poin	
		Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah	55.0 Skor	
		Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan	81.0 %	
		Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah	3.0 Skor	
		Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	75.0 Skor	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68.18 Poin	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		45,123,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			45,123,000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		laporan Penyediaan Tagihan Telepon,Air, Listrik, Internet	12 laporan	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			410,130,000
		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	30.0 per 100.000 penduduk	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100.0 %	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		410,130,000
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			180,130,000
		melaksanakan Pendampingan Yang dilaksanakan pada pelayanan yang diberikan kepada perempuan yang mengalami kekerasan	40 Orang	
		melaksanakan Pendampingan Home Visit yang dilaksanakan pada korban perempuan yang mengalami kekerasan	40 Orang	
		melaksanakan Pelayanan Konsultasi dan pendampingan Rohaniawan pada perempuan korban yang mengalami kekerasan	40 orang	
		melaksanakan Pelayanan Konsultasi dan pendampingan Psikolog pada perempuan korban yang mengalami kekerasan	40 orang	
		melaksanakan Pelayanan Konsultasi dan pendampingan Hukum pada perempuan korban kekerasan	40 orang	
		melaksanakan pertemuan koordinasi penanganan kasus perempuan korban kekerasan	6 Bulan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			230,000,000
		melaksanakan Pendampingan Yang dilaksanakan untuk korban kekerasan	40 layanan	
		melaksanakan layanan Rawat Inap yang diberikan kepada korban kekerasan perempuan	1 layanan	
		Melaksanakan pelayanan Tenaga Ahli bagi perempuan korban kekerasan	5 layanan	
		melaksanakan pelayanan rumah perlindungan Sementara bagi perempuan korban kekerasan	5 layanan	
		melaksanakan home visit yang dilaksanakan untuk perempuan korban kekerasan	40 layanan	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			122,290,000
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	100.0 %	
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100.0 Persen	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		122,290,000
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang			65,000,000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		melaksanakan pelayanan Biaya Rawat inap Korban kekerasan pada anak	1 orang	
		melaksanakan pelayanan Biaya Rawat Jalan Korban kekerasan pada anak	30 orang	
		melaksanakan Pendampingan home visit anak korban kekerasan	60 orang	
		melaksanakan pendampingan pada anak korban kekerasan	60 orang	
		melaksanakan kegiatan Psiko Edukasi untuk anak korban kekerasan	0 Orang	
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			57,290,000
		melaksanakan pelayanan rawat inap yang diberikan kepada masyarakat bagi korban kekerasan anak	1 Orang	
		Melaksanakan Pelayanan pendampingan bagi korban kekerasan anak	25 Orang	
		Melaksanakan Pelayanan Pendampingan home visit bagi korban kekerasan anak	25 Orang	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DP3AP2KB Kota Cilegon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran DP3AP2KB Kota Cilegon.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No.	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$x > 100\%$
2	Baik	$80\% \leq x \leq 100\%$
3	Cukup	$60\% \leq x \leq 80\%$
4	Kurang	$20\% < x \leq 60\%$
5	Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini DP3AP2KB Kota Cilegon dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target program dan kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja, dan penilaian tingkat pencapaian target tujuan dan sasaran dari masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kota Cilegon.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas DP3AP2KB Kota Cilegon juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DP3AP2KB Kota Cilegon tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
RENSTRA TAHUN 2021 - 2026							
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	68,18	79,93	117%	Sangat Baik	Bagian Organisasi Pemda Kota Cilegon Tahun 2025
		Indeks RB Perangkat Daerah	72,85	72,85	100%	Baik	Bagian Organisasi Pemda Kota Cilegon Tahun 2023
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,63	93,5	103%	Sangat Baik	Self Assesment UPTD PPA Tahun 2025
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga	Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk	1,5	1,1	73%	Cukup	Bidang DALDUK KB DP3AP2KB Tahun 2024
		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	30	26,13	87%	Baik	Bidang PUGPPP DP3AP2KB Tahun 2025
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	100	100	100%	Baik	Bidang PHAPKAPS D DP3AP2KB Tahun 2025
		Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya	45	47,54	106%	Sangat Baik	Bidang PK2 DP3AP2KB Tahun 2025
RENSTRA TAHUN 2025 – 2029							
1	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak Dan Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,248	0,248	100%	Baik	BPS Kota Cilegon Tahun 2024
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,50	64,40	98,32%	Baik	BKKBN Tahun 2024
2	Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,30	71,10	99,72%	Baik	Bappedalitba ng Kota Cilegon Tahun 2025
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	44,43	43,26	97,37%	Baik	BPS Kota Cilegon Tahun 2024

3	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	73,60	70,40	95,65%	Baik	BKKBN Tahun 2024
4	Terwujudnya Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,85	72,85	100%	Baik	PMPRB Tahun 2023

Sumber : e-Sakip DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025

Capaian kinerja DP3AP2KB Kota Cilegon berdasarkan tabel diatas menunjukkan capaian kinerja berdasarkan 2 (dua) periode renstra yaitu Renstra Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Tahun 2025 – 2029. Hal ini disebabkan adanya dinamika pemilihan Kepala Daerah yang dilakkan secara serentak di Indonesia yang menyebabkan adanya perubahan visi misi dan berpengaruh terhadap penentuan indikator kinerja.

Periode Renstra Tahun 2021- 2026 memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja dengan persentase capaian sebagian besar diatas 80% . Berdasarkan pengkategorian capaian kinerja, Indikator kinerja dengan kategori/intervensi capaian Sangat Baik (SB) dan rata-rata % capaian >100% adalah Nilai Lakip Perangkat Daerah (117%); Indeks Kepuasan Masyarakat (103%); Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya (106%). Indikator kinerja dengan kategori/intervensi capaian Baik (B) dan rata-rata % capaian $80\% \leq x \leq 100\%$ adalah Indeks RB Perangkat Daerah (100%); Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (87%); Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani (100%). Indikator kinerja dengan kategori/intervensi capaian Cukup (C) dan rata-rata % capaian $60\% \leq x \leq 80\%$ adalah Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk (73%).

Periode Renstra Tahun 2025- 2029 memiliki 6 (enam) indikator kinerja dengan persentase capaian diatas 95% . Berdasarkan pengkategorian capaian

kinerja, Indikator kinerja dengan kategori/intervensi capaian Baik (B) dan rata-rata % capaian $80\% \leq x \leq 100\%$ adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (100%), Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (98,32%), Indeks Perlindungan Anak (IPA) (99,72%), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (97,37%), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)(95,65%), Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (100%).

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak Dan Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	NA	0,248	NA	0,248	0,248	100,00%
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	NA	64,40	NA	65,50	64,40	98,32%
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,85	70,90	100,07%	71,30	71,10	99,72%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	NA	43,26	NA	44,43	43,26	97,37%
	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	NA	70,40	NA	73,60	70,40	95,65%
	Terwujudnya Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	75	72,85	97,13%	72,85	72,85	100,00%

Sumber : Laporan LKjIP DP3AP2KB Tahun 2024, 2025

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja diatas pada tahun 2025 terdapat indikator baru yang tidak terdapat di tahun 2024. Penentuan inidkator baru tersebut berdasarkan Renja Perubahan Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025 – 2029.

Indikator baru di tahun 2025 yang tidak terdapat di tahun sebelumnya yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dengan capaian kinerja sebesar 100%; Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan capaian kinerja sebesar 98,32%; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan dengan capaian kinerja sebesar 97,37%; Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dengan capaian kinerja sebesar 95,65%.

Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada tahun 2025 (99,72%) mengalami penurunan dalam pencapaian dibandingkan tahun 2024 (100,07%) meskipun penurunan ini tidak signifikan. Penurunan capaian indicator kinerja ini disebabkan adanya kebijakan penatausahaan tingkat kota yang lebih banyak pada program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indicator Indeks Perlindungan Anak (IPA), diantaranya program pemenuhan hak anak dan program perlindungan khusus anak

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 (100%) mengalami peningkatan dalam pencapaian dibandingkan tahun 2024 (97,13%). Peningkatan ini disebabkan oleh pemahaman serta perubahan kinerja SDM disertai penggunaan teknologi digitalisasi yang menyebabkan akuntabilitas kinerja dan keuangan lebih baik dan mudah diakses

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak Dan Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,248	0,242	102,48%
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,40	70,1	91,87%
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,10	72,90	97,53%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	43,26	48,46	89,27%
3	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	70,40	73,60	95,65%
4	Terwujudnya Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,85	88,00	82,78%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan variasi kemajuan capaian sasaran strategis berdasarkan realisasi kinerja tahun 2025 dan target akhir tahun 2029. Semua capaian kinerja menunjukkan hasil tingkat kemajuan diatas 80%. Tingkat Kemajuan tertinggi pada indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yaitu mencapai 102,48%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak Dan Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,248	0,421	58,91%
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,40	62,40	103,21%
2	Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,10	62,37	114,00%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	43,26	56,42	76,67%
3	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	70,40	61,8	113,92%
4	Terwujudnya Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,85	69,46	104,88%

Berdasarkan tabel diatas antara realisasi tahun 2025 dan standar nasional memperlihatkan adanya capaian indikator diatas capaian nasional dan dibawah capaian nasional. Realisasi capaian tahun 2025 yang melebihi target nasional ada pada Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (64,40); Indeks Perlindungan Anak (IPA) (71,10); Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (70,40); Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (72,85). Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) meskipun menunjukkan angka yang lebih besar dari target nasional tetapi merupakan nilai yang terbalik dari pemaknaannya dalam arti masih tinggi nya ketimpangan gender yang terjadi.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak Dan Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,248	0,248	100,00%	Target Indeks Ketimpangan Gender (IKG) telah tercapai sesuai rencana, namun capaian tersebut masih bersifat stagnan dan belum menunjukkan penurunan ketimpangan gender yang signifikan. Kondisi ini mencerminkan bahwa penetapan target dan intervensi yang dilaksanakan masih cenderung konservatif sehingga belum mendorong percepatan perubahan yang diharapkan.	Penguatan intervensi kebijakan pada dimensi IKG yang masih lemah, khususnya akses kesehatan reproduksi perempuan, peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, serta penguatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, memperkuat integrasi isu gender dalam perencanaan dan penganggaran lintas OPD agar penurunan IKG menjadi tanggung jawab bersama dan terinternalisasi dalam prioritas pembangunan daerah.
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,50	64,40	98,32%	Menunjukkan kualitas keluarga yang baik dalam dimensi ketahanan fisik, ekonomi, sosial-psikologis, sosial-budaya, dan legalitas struktur keluarga, dengan fokus pada kesetaraan gender dan hak anak	Solusi ke depan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kota Cilegon melibatkan pendekatan holistik dan terintegrasi yang berfokus pada tiga aspek utama: peningkatan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas kesehatan (termasuk kesehatan reproduksi), dan penguatan fungsi-fungsi dasar keluarga.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,30	71,10	99,72%	Indeks Perlindungan Anak tahun 2025 mencapai 71,1 poin dengan angka pencapaian kinerja terhadap target mencapai 99,72%. Pencapaian ini didukung dengan adanya lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif dan sesuai standar di Kota Cilegon pada tahun 2025 mencapai 40%, hal ini menunjukkan efektivitas pembinaan, koordinasi, dan meningkatnya komitmen lembaga layanan dalam memenuhi standar perlindungan anak. Selain itu Capaian penanganan korban kekerasan terhadap anak telah mencapai 100% hal ini sudah berjalan efektif, responsif, dan berkelanjutan, dan mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dan lembaga layanan dalam menjamin pemenuhan hak anak. Keberhasilan ini didukung oleh keterlibatan aktif jejaring layanan dan peran PATBM dalam deteksi dini serta rujukan kasus, sehingga indikator kinerja program pada aspek penanganan korban dapat tercapai secara optimal.	Hal yang penting dilakukan adalah koordinasi dengan kemenppa untuk mendapatkan standarisasi layanan perlindungan anak, menguatkan kemitraan dengan lembaga layanan perlindungan anak yang ada di kota cilegon. Selain itu mempertahankan dan meningkatkan penguatan pembinaan dan koordinasi lintas sektor, juga optimalisasi peran unit layanan perlindungan anak dan PATBM, serta peningkatan pendampingan kasus secara berkelanjutan. Selain itu, dilakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan satuan pendidikan, meskipun belum seluruh sekolah mendapatkan sosialisasi secara optimal. program selanjutnya yaitu penguatan kerjasama lintas OPD dan pengorganisasian sekolah serta komunitas yang akan meningkatkan efektivitas pencegahan kekerasan terhadap anak dan menjaga keberlanjutan capaian kinerja program.
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	44,43	43,26	97,37%	Capaian indikator tercapai melalui keberhasilan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan pelatihan e-commerce bagi perempuan yang mampu meningkatkan partisipasi kerja dan aktivitas ekonomi produktif. Namun, capaian yang jauh melebihi target juga menunjukkan bahwa penetapan target awal belum sepenuhnya mencerminkan potensi dan tren aktual di lapangan.	Meningkatkan kualitas partisipasi kerja perempuan melalui penguatan keterampilan dan kewirausahaan berkelanjutan, serta menyesuaikan target ke depan agar lebih realistis dan dengan memperhatikan aspek pekerjaan layak.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
3	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	73,60	70,40	95,65%	<p>Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) merupakan indeks komposit yang menggambarkan sejauh mana pembangunan telah mengintegrasikan aspek kependudukan sebagai faktor utama. Nilai IPBK Indonesia sebesar 70,40 menunjukkan bahwa secara umum pembangunan berwawasan kependudukan berada pada kategori cukup baik, namun masih menyisakan ruang perbaikan yang signifikan.</p> <p>Capaian ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan program pembangunan sudah mulai mempertimbangkan dinamika kependudukan, seperti kualitas penduduk, persebaran penduduk, struktur umur, serta keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, nilai tersebut juga mencerminkan bahwa integrasi isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan belum sepenuhnya optimal dan merata di seluruh wilayah.</p> <p>Beberapa tantangan yang masih memengaruhi capaian IPBK antara lain ketimpangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah, urbanisasi yang belum sepenuhnya terkendali, serta belum maksimalnya pemanfaatan bonus demografi. Di sisi lain, nilai 70,40 juga menjadi sinyal positif bahwa dengan penguatan kebijakan kependudukan—seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta penataan persebaran penduduk—IPBK berpotensi untuk terus meningkat.</p> <p>Dengan demikian, IPBK</p>	<p>Solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yaitu masih diperlukan kebijakan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan agar aspek kependudukan benar-benar menjadi arus utama dalam pembangunan nasional dan daerah. Rekomendasi Kebijakan dapat berupa :</p> <p>Peningkatan kualitas penduduk, memperkuat akses dan mutu pendidikan serta kesehatan (termasuk gizi dan kesehatan reproduksi).</p> <p>Pengembangan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.</p> <p>Pengendalian kuantitas dan struktur penduduk</p> <p>Optimalisasi program keluarga berencana dan pendewasaan usia perkawinan.</p> <p>Antisipasi bonus demografi melalui penciptaan lapangan kerja produktif.</p> <p>Pengelolaan mobilitas dan persebaran penduduk</p> <p>Penguatan pembangunan wilayah luar Jawa untuk mengurangi ketimpangan.</p> <p>Perencanaan urbanisasi yang terintegrasi dengan perumahan, transportasi, dan layanan dasar.</p> <p>Penguatan tata kelola dan data kependudukan</p> <p>Integrasi data kependudukan lintas sektor sebagai dasar perencanaan.</p> <p>Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan berbasis kependudukan.</p>

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
						sebesar 70,40 dapat dijadikan dasar evaluasi dan perumusan kebijakan yang lebih terintegrasi agar pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga selaras dengan kondisi, potensi, dan dinamika kependudukan Indonesia.	
4	Terwujudnya Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,85	72,85	100,00%	Penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2025 secara khusus tidak dilakukan oleh APIP, karena itu nilai Reformasi Birokrasi menggunakan penilaian yang dilakukan oleh APIP pada tahun 2023 yaitu mencapai 72,85 poin. Adanya Perubahan budaya dan SDM serta pelayanan publik yang belum maksimal saat penilaian menyebabkan hasil yang belum maksimal. Namun sejalan dengan perkembangan Reformasi Birokrasi yang semakin pesat dan mengharuskan pemahaman serta perubahan kinerja SDM dengan penggunaan teknologi digitalisasi yang menyebabkan akuntabilitas kinerja dan keuangan lebih baik dan mudah diakses	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan membangun budaya organisasi yang adaptif dan memastikan keberlanjutan perubahan melalui komitmen bersama Internal Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat di analisa bahwa setiap target indikator kinerja hampir mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya system digitalisasi yang sudah digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan dan peningkatan pemahaman sumber daya terhadap pentingnya kinerja yang baik. Selain itu adanya koordinasi dengan semua pihak yang berkontribusi terhadap pencapain target indikator kinerja.

Namun agar pencapaian indicator kinerja lebih baik lagi diharapkan dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja program dan kegiatan dengan melakukan

koordinasi dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatan, optimalisasi tim kerja dan penentuan tugas masing masing tim sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan dapat terdokumentasikan dengan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu perlunya dibuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Rencana Aksi (Renaksi) setiap Program/Kegiatan akan memudahkan dalam perencanaan untuk masa yang akan datang. Salah satu RTL dan Renaksi berupa inovasi dalam hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna layanan mendapat layanan yang sesuai standar.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						92,65	Menunjang
1	Meningkat nya Kesetaraa n Gender, Perlindun gan Anak Dan Terwujudn ya Keluarga Yang Berkualita s	Indeks Ketimp angan Gender (IKG)	100				
		Indeks Pemba ngunan Keluarg a (iBangg a)	98,32				

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
2	Terwujudnya Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Indeks RB Perangkat Daerah	100				
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		96.30	Menunjang
					Indeks Pelayanan Publik		
					Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah		
					Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan		
					Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah		
					Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100.00	Menunjang
					Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun	100.00	Menunjang
					Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun	100.00	Menunjang
					Dokumen Manajemen Risiko yang disusun	100.00	Menunjang
					Jumlah dokumen Rencana Kerja Perubahan yang disusun	100.00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100.00	Menunjang
					Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun	100.00	Menunjang
					Jumlah dokumen perencanaan anggaran perubahan yang disusun	100.00	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100.00	Menunjang
					Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun	100.00	Menunjang
					Jumlah dokumen perencanaan anggaran Perubahan yang disusun	100.00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100.00	Menunjang
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja	100.00	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100.00	Menunjang
					Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun	100.00	Menunjang
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disusun	100.00	Menunjang
					Jumlah Laporan Evaluasi Renja-PD Triwulanan	100.00	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.79	Tidak Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		88.93	Menunjang
					Jumlah Orang dan Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88.93	Menunjang
					Jumlah Pelayanan Penyediaan Tambah Penghasilan ASN (Prioritas Daerah)	88.93	Menunjang
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100.00	Menunjang
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100.00	Menunjang
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/		100.00	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Semesteran SKPD			
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00	Menunjang
					Jumlah Laporan Keuangan Semester I SKPD	100.00	Menunjang
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0.00	Tidak Menunjang
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0.00	Tidak Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.00	Menunjang
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100.00	Menunjang
					Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.00	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100.00	Menunjang
					Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.00	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100.00	Menunjang
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.00	Menunjang
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100.00	Menunjang
					Belanja Bahan-Bahan Lainnya / Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	100.00	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100.00	Menunjang
					Belanja Natura dan Pakan-Natura / Belanja Makanan dan Minuman Rapat /	100.00	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100.00	Menunjang
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor/Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.00	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		100.00	Menunjang
					Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	100.00	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100.00	Menunjang
					Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	100.00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100.00	Menunjang
					Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	100.00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100.00	Menunjang
					Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100.00	Menunjang
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Dekorasi Stand)	100.00	Menunjang
					Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (SEWA KENDARAAN ESELON II)	100.00	Menunjang
					Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (Eselon III (1500 CC))	100.00	Menunjang
					Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor UPTD PPA Dan Gudang alkon	100.00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100.00	Menunjang
					Pemberian Honorarium tenaga administrasi	100.00	Menunjang
					Belanja Jasa Tenaga Kebersihan ,	100.00	Menunjang
					Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	100.00	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	100.00	Menunjang
					Pemberian Honorarium Instruktur Senam	100.00	Menunjang
					Pemberian Honorarium Rohaniawan	100.00	Menunjang
					Pemberian Honorarium Tenaga Operator Komputer	100.00	Menunjang
					Pemberian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	100.00	Menunjang
					Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	100.00	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100.00	Menunjang
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100.00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100.00	Menunjang
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100.00	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100.00	Menunjang
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100.00	Menunjang
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	97,37				

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		90.83	Menunjang
					Persentase OPD yang melaksanakan Anggaran Responsif Gender	166.67	Menunjang
					Presentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya	105.64	Menunjang
					Persentase Anggota Organisasi Perempuan yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program	100.00	Menunjang
					Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	100.00	Menunjang
				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00	Menunjang
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota		100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang Memperoleh Pendampingan Penyelenggaraan PUG dan Mengikuti Pelatihan Percepatan Anggaran Responsif Gender (ARG)	100.00	Menunjang
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.00	Menunjang
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		80.00	Menunjang
					Jumlah peserta acara Peringatan Hari Ibu	100.00	Menunjang
					Jumlah organisasi yang mengikuti Pembinaan LPLPP Ke Organisasi Perempuan Kota Cilegon	100.00	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Jumlah peserta acara Peringatan Hari Kartini	0.00	Tidak Menunjang
					Jumlah organisasi yang mengikuti Workshop Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik	100.00	Menunjang
					Jumlah peserta Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Bidang E-commerce	100.00	Menunjang
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	92.50	Menunjang
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		92.50	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Puncak HUT DWP Kota Cilegon	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Seminar Sehari DWP Kota Cilegon	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Bidang Ekonomi	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Bidang Pendidikan	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Anggota DWP Kota Cilegon	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Bidang Sosial dan Budaya	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kapasitas DWP Kota Cilegon	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Rapat Kerja DWP Kota Cilegon	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Bakti Sosial DWP Kota Cilegon	0.00	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Rapat Pengurus GOW	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus GOW Kota Cilegon 2025-2029	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Wanita	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Organisasi Wanita	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Bakti Sosial GOW	0.00	Tidak Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kualitas Pendidikan Organisasi Wanita	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Rapat Kerja GOW	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Rapat Pimpinan GOW	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Musyawarah Daerah GOW Kota Cilegon	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Organisasi wanita	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Sinergitas Organisasi Dalam Meningkatkan Kesenjangan Gender	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Pengajian Rutin DWP Kota Cilegon	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Pertemuan Rutin PKK Kota Cilegon	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Pengajian Rutin PKK Kota Cilegon	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Dasa Wisma PKK Kota Cilegon	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Peduli Stunting PKK Kota Cilegon	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Bank Sampah (PKK)	100.00	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Pembekalan Sekretaris PKK	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Karakter Melalui PAAR (PKK)	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan UP2K (PKK)	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Sex dan Sex Bebas (PKK)	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Puncak HKG PKK Kota Cilegon	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi Koperasi dan Adm Galeri Pelangi (PKK)	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi Pemanfaatan Pangan Lokal (PKK)	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Bakti Sosial PKK	0.00	Tidak Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Capacity Building Ketua TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Cilegon	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB)	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan TP.PKK Tingkat Kecamatan Se-Kota Cilegon	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Sarasehan Perlindungan Perempuan dan Anak (KRPPA)	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Rapat Koordinasi TP.PKK Kecamatan dan TP.PKK Kelurahan	100.00	Menunjang
					Jumlah SDM yang mengikuti Pertemuan Rutin DWP Kota Cilegon	100.00	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		50.00	Tidak Menunjang
					Persentase Keluarga Binaan yang Meningkat Kualitasnya	123.46	Menunjang
					Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0.00	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.00	Tidak Menunjang
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0.00	Tidak Menunjang
					Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00	Tidak Menunjang
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.00	Menunjang
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100.00	Menunjang
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		0.00	Tidak Menunjang
					Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	100.00	Menunjang
					Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	100.00	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.00	Tidak Menunjang
				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		0.00	Tidak Menunjang
					Updating Website Data Gender dan Anak	0.00	Tidak Menunjang
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		100.00	Menunjang
					Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	135.03	Menunjang
					Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100.00	Menunjang
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100.00	Menunjang
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		100.00	Menunjang
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan dari TPPO dan PKDRT	100.00	Menunjang
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00	Menunjang
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan		100.00	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
					Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Kasus	100.00	Menunjang
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	99,72				
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		12.50	Tidak Menunjang
					Persentase Pencapaian 24 Indikator Kota Layak Anak	100.00	Menunjang
					Persentase lembaga penyediaan layanan perlindungan anak yang aktif dan sesuai standar (%)	100.00	Menunjang
				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25.00	Tidak Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		25.00	Tidak Menunjang
					Hari Anak Nasional	100.00	Menunjang
					Pemilihan Duta Anak	0.00	Tidak Menunjang
					Gugus Tugas KLA	0.00	Tidak Menunjang
					Penghargaan KLA	0.00	Tidak Menunjang
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0.00	Tidak Menunjang
					Pelatihan Sekolah Ramah Anak	0.00	Tidak Menunjang
					Workshop Aplikasi KLA	0.00	Tidak Menunjang
					Pelatihan KHA bagi Tenaga Kesehatan	0.00	Tidak Menunjang
					Pembinaan Pondok Pesantren Ramah Anak	0.00	Tidak Menunjang
					Koordinasi Pembinaan Forum Anak Nasional	0.00	Tidak Menunjang
					Rapat rutin Forum Anak	0.00	Tidak Menunjang
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0.00	Tidak Menunjang
					Kota Layak Anak	0.00	Tidak Menunjang
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		8.89	Tidak Menunjang
					Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	100.00	Menunjang
					Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100.00	Menunjang
					Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100.00	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	16.67	Menunjang
				Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		33.33	Menunjang
					Penyusunan Standar Operasional Pelayanan Integrasi Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	100.00	Menunjang
					Sosialisasi Pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak bagi Siswa Sekolah Dasar	0.00	Tidak Menunjang
					Sosialisasi Pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama	0.00	Tidak Menunjang
				Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota		0.00	Tidak Menunjang
					Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	0.00	Tidak Menunjang
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.00	Tidak Menunjang
				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		0.00	Tidak Menunjang
					Pembinaan Pelayanan Pencegahan Kejahatan Seksual Anak di Kab/Kota	0.00	Tidak Menunjang
					Sosialisasi GN-AKSA (Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak) di Kab/Kota	0.00	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					KRPPA Kota Cilegon	0.00	Tidak Menunjang
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.00	Tidak Menunjang
				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/		0.00	Tidak Menunjang
					Pelatihan Pendampingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	0.00	Tidak Menunjang
				Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		20.00	Tidak Menunjang
					Pelatihan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak / Pelatihan PATBM	100.00	Menunjang
					Lomba PATBM	0.00	Tidak Menunjang
					Bantuan Alat Edukasi bagi AMPK	0.00	Tidak Menunjang
					Bimtek SPPA	0.00	Tidak Menunjang
					Monev PATBM	0.00	Tidak Menunjang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						40.90	Tidak Menunjang
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN		40.90	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
				DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		40.90	Tidak Menunjang
4	Terwujudn ya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pemba ngunan Berwa san Kepend udukan (IPBK) (Indeks)	95,65				
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		33.17	Tidak Menunjang
					Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk	73.33	Tidak Menunjang
					TFR (Angka Kelahiran Total)	100.00	Menunjang
					Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	113.75	Menunjang
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0.00	Tidak Menunjang
				Pelaksanaan Survei/Pendataa n Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan		0.00	Tidak Menunjang
					Kegiatan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	0.00	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	66.33	Tidak Menunjang
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		100.00	Menunjang
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100.00	Menunjang
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		32.66	Tidak Menunjang
					Operasional Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	32.66	Tidak Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		81.21	Menunjang
					Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja dalam Pemenuhan Kebutuhan Ber-KB	100.00	Menunjang
					Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	99.28	Menunjang
					Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	104.83	Menunjang
					Proporsi Kampung KB Mandiri	99.37	Menunjang
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	75.00	Tidak Menunjang
				Pengendalian Program KKBPK		0.00	Tidak Menunjang
					Pelayanan KB IUD, Implant, Cabut Implant dan MOW	0.00	Tidak Menunjang
					Parenting dan Edukasi Stunting Bagi Keluarga Beresiko Stunting	0.00	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Sosialisasi dan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	0.00	Tidak Menunjang
					Penyuluhan dan Edukasi Sekolah Siaga Kependudukan	0.00	Tidak Menunjang
					Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan	0.00	Tidak Menunjang
					Evaluasi Sekolah Siaga Kependudukan	0.00	Tidak Menunjang
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		50.00	Tidak Menunjang
					Pengelolaan Operasional dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	100.00	Menunjang
					Pengelolaan Operasional dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	0.00	Tidak Menunjang
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		100.00	Menunjang
					KEGIATAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	100.00	Menunjang
				Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		100.00	Menunjang
					Pelaksanaan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.00	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		100.00	Menunjang
					Kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	100.00	Menunjang
				Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		100.00	Menunjang
					Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)	100.00	Menunjang
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	99.93	Menunjang
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		99.87	Menunjang
					Honor Kader Cilegon Mandiri (KCM) serta Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi KCM	99.87	Menunjang
				Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		100.00	Menunjang
					Kegiatan IMP Bangga Kencana Dan Sub IMP Bangga Kencana (DAK) Serta OPERasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan (Poktan) DAK	100.00	Menunjang
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	99.91	Menunjang
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke		100.00	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
					Distribusi Alokon Dan Non Alokon	100.00	Menunjang
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		99.74	Menunjang
					Pelayanan KB IUD, Implant, Cabut Implant dan MOW	99.74	Menunjang
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		100.00	Menunjang
					Pembinaan Pelayanan KB di Faskes (DAK)	200.00	Menunjang
					Pembinaan dan Evaluasi Fasilitas Kesehatan KB (APBD)	0.00	Tidak Menunjang
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	50.00	Tidak Menunjang
				Pembinaan Terpadu Kampung KB		0.00	Tidak Menunjang
					Pembinaan Terpadu Kampung KB	0.00	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		100.00	Menunjang
					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	100.00	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		8.33	Tidak Menunjang
					Persentase Anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKA/UPPKS yang ber-KB	99.89	Menunjang
					Indeks Lansia Berdaya	99.12	Menunjang
					Indeks Pengasuhan Remaja	99.09	Menunjang
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	16.67	Tidak Menunjang
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		100.00	Menunjang
					Pengadaan BKB Kit Stunting	100.00	Menunjang
				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		25.00	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Kegiatan Adujak GenRe	100.00	Menunjang
					Kegiatan Sosialisasi Kampung Digital Pada Remaja GenRe	0.00	Tidak Menunjang
					Kegiatan Pembinaan Tim Pendamping Keluarga	0.00	Tidak Menunjang
					Kegiatan Evaluasi Tim Pendamping Keluarga	0.00	Tidak Menunjang
				Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		0.00	Tidak Menunjang
					Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0.00	Tidak Menunjang
					Evaluasi Program Bangga Kencana	0.00	Tidak Menunjang
				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akteptor (UPPKA)		0.00	Tidak Menunjang
					Kegiatan Tribina dan UPPKA	0.00	Tidak Menunjang
				Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		0.00	Tidak Menunjang
					Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0.00	Tidak Menunjang
				Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung		0.00	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Tercapainya iBangga			
					Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	0.00	Tidak Menunjang
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		25.00	Tidak Menunjang
					Pencatatan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	25.00	Tidak Menunjang
					Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	50.00	Tidak Menunjang
					Dukungan Output DAK Non Fisik	0.00	Tidak Menunjang
				Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		0.00	Tidak Menunjang
					Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0.00	Tidak Menunjang
				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat		0.00	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aksesor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			
					KEGIATAN PEMBINAAN SEKOLAH LANSIA	0.00	Tidak Menunjang
					KEGIATAN UPPKA	0.00	Tidak Menunjang
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0.00	Tidak Menunjang
				Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		0.00	Tidak Menunjang
					Kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)	0.00	Tidak Menunjang
					KEGIATAN SAKA KENCANA PRAMUKA	0.00	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak						139.24	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100.00	Menunjang
					Nilai Lakip Perangkat Daerah	117.23	Menunjang
					Indeks RB Perangkat Daerah	100.00	Menunjang
					Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	103.17	Menunjang
					Indeks Pelayanan Publik	100.00	Menunjang
					Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah	129.09	Menunjang
					Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan	101.04	Menunjang
					Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah	116.67	Menunjang
					Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	129.99	Menunjang
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	117.23	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100.00	Menunjang
					laporan Penyediaan Tagihan Telepon,Air, Listrik, Internet	100.00	Menunjang
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		219.38	Menunjang
					Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	163.33	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100.00	Menunjang
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	219.38	Menunjang
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		293.75	Menunjang
					melaksanakan Pendampingan Yang dilaksanakan pada pelayanan yang diberikan kepada perempuan yang mengalami kekerasan	150.00	Menunjang
					melaksanakan Pendampingan Home Visit yang dilaksanakan pada korban perempuan yang mengalami kekerasan	150.00	Menunjang
					melaksanakan Pelayanan Konsultasi dan pendampingan Rohaniawan pada perempuan korban yang mengalami kekerasan	162.50	Menunjang
					melaksanakan Pelayanan Konsultasi dan pendampingan Psikolog pada perempuan korban yang mengalami kekerasan	150.00	Menunjang
					melaksanakan Pelayanan Konsultasi dan pendampingan Hukum pada perempuan korban kekerasan	150.00	Menunjang
					melaksanakan pertemuan koordinasi penanganan kasus perempuan korban kekerasan	1,000.00	Tidak Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		145.00	Menunjang
					melaksanakan Pendampingan Yang dilaksanakan untuk korban kekerasan	12.50	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					melaksanakan layanan Rawat Inap yang diberikan kepada korban kekerasan perempuan	500.00	Menunjang
					Melaksanakan pelayanan Tenaga Ahli bagi perempuan korban kekerasan	100.00	Menunjang
					melaksanakan pelayanan rumah perlindungan Sementara bagi perempuan korban kekerasan	100.00	Menunjang
					melaksanakan home visit yang dilaksanakan untuk perempuan korban kekerasan	12.50	Tidak Menunjang
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		98.33	Menunjang
					Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	100.00	Menunjang
					Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100.00	Menunjang
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98.33	Menunjang
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		96.67	Menunjang
					melaksanakan pelayanan Biaya Rawat inap Korban kekerasan pada anak	100.00	Menunjang
					melaksanakan pelayanan Biaya Rawat Jalan Korban kekerasan pada anak	83.33	Menunjang
					melaksanakan Pendampingan home visit anak korban kekerasan	100.00	Menunjang
					melaksanakan pendampingan pada anak korban kekerasan	100.00	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					melaksanakan kegiatan Psiko Edukasi untuk anak korban kekerasan	100.00	Menunjang
				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		100.00	Menunjang
					melaksanakan pelayanan rawat inap yang diberikan kepada masyarakat bagi korban kekerasan anak	100.00	Menunjang
					Melaksanakan Pelayanan pendampingan bagi korban kekerasan anak	100.00	Menunjang
					Melaksanakan Pelayanan Pendampingan home visit bagi korban kekerasan anak	100.00	Menunjang

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja output Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon mencapai nilai 92,65%. Tidak tercapainya realisasi kinerja sebanyak 100% disebabkan adanya kebijakan penatausahaan tingkat kota pada beberapa sub kegiatan namun tetap tidak merubah ketercapaian kinerja program. Selain itu ada beberapa sub kegiatan yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu untuk melaksanakannya.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	28,994,614,552	27,538,123,224	94.98

	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	28,417,071,552	27,009,016,441	95.05
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14,937,835,552	13,867,327,541	92.83
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14,937,835,552	13,867,327,541	92.83
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,069,287,167	12,389,233,860	94.80
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,731,100	32,384,100	77.60
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,314,700	13,084,700	85.44
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,980,700	1,929,700	38.74
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,660,800	1,452,800	31.17
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,164,800	6,702,800	93.55
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,610,100	9,214,100	95.88
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,693,638,052	8,359,113,854	96.15
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,646,395,052	8,313,257,854	96.15
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39,838,000	39,838,000	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	180,000	180,000	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,774,000	3,424,000	71.72
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,451,000	2,414,000	98.49
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26,400,000	26,400,000	100.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26,400,000	26,400,000	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330,580,416	279,679,601	84.60
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,767,000	20,237,132	97.45
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48,817,000	42,827,425	87.73

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35,010,000	33,825,366	96.62
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121,368,000	90,427,618	74.51
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63,722,416	61,880,358	97.11
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11,000,000	1,980,000	18.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29,896,000	28,501,702	95.34
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,610,334,249	3,427,542,005	94.94
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102,576,158	78,798,859	76.82
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	723,720,000	702,200,000	97.03
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,779,038,091	2,641,543,146	95.05
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366,603,350	264,114,300	72.04
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91,866,600	85,667,000	93.25
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239,021,750	144,126,000	60.30
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,715,000	34,321,300	96.10
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,237,963,000	1,074,128,210	86.77

	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	59,593,000	41,046,000	68.88
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	59,593,000	41,046,000	68.88
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	147,916,000	123,307,240	83.36
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	147,916,000	123,307,240	83.36
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1,030,454,000	909,774,970	88.29
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1,030,454,000	909,774,970	88.29
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	121,920,000	104,409,621	85.64
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	77,805,000	71,086,620	91.37
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	77,805,000	71,086,620	91.37
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44,115,000	33,323,001	75.54
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	44,115,000	33,323,001	75.54
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	257,771,900	78,573,000	30.48
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	177,568,900	2,060,000	1.16
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	177,568,900	2,060,000	1.16
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	80,203,000	76,513,000	95.40

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80,203,000	76,513,000	95.40
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0	0	0.00
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0.00
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0.00
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	14,642,000	14,642,000	100.00
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	11,700,000	11,700,000	100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	11,700,000	11,700,000	100.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2,942,000	2,942,000	100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,942,000	2,942,000	100.00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0.00
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	236,251,485	206,340,850	87.34
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	132,940,000	121,279,850	91.23
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	130,000,000	118,339,850	91.03
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	2,940,000	2,940,000	100.00
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0.00
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	0	0	0.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103,311,485	85,061,000	82.33

	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88,400,000	70,150,000	79.36
	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	14,911,485	14,911,000	100.00
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13,479,236,000	13,141,688,900	97.50
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13,479,236,000	13,141,688,900	97.50
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13,479,236,000	13,141,688,900	97.50
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	147,200,000	146,797,000	99.73
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0	0	0.00
	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	0	0	0.00
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	147,200,000	146,797,000	99.73
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	59,000,000	58,597,000	99.32
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	88,200,000	88,200,000	100.00
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10,919,796,000	10,717,643,900	98.15
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	543,600,000	484,658,900	89.16
	Pengendalian Program KKBPK	0	0	0.00
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	83,600,000	78,800,000	94.26
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	160,000,000	158,020,000	98.76

	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100,000,000	88,478,900	88.48
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	0	0.00
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200,000,000	159,360,000	79.68
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	9,827,550,000	9,739,699,000	99.11
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	9,698,550,000	9,610,699,000	99.09
	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	129,000,000	129,000,000	100.00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	442,246,000	388,462,000	87.84
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46,800,000	16,600,000	35.47
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	361,250,000	340,960,000	94.38
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	34,196,000	30,902,000	90.37
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	106,400,000	104,824,000	98.52
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	0	0	0.00
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	106,400,000	104,824,000	98.52
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,412,240,000	2,277,248,000	94.40
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2,412,240,000	2,277,248,000	94.40
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130,000,000	107,670,000	82.82
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,	70,183,000	59,078,000	84.18

	PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0	0	0.00
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0	0	0.00
	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0	0	0.00
	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	0	0	0.00
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2,211,000,000	2,110,500,000	95.45
	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0	0	0.00
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	1,057,000	0	0.00
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	0.00
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0	0.00
	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	577,543,000	529,106,783	91.61
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45,123,000	29,561,068	65.51

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45,123,000	29,561,068	65.51
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,123,000	29,561,068	65.51
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	410,130,000	403,654,092	98.42
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	410,130,000	403,654,092	98.42
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	180,130,000	180,130,000	100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	230,000,000	223,524,092	97.18
3	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	122,290,000	95,891,623	78.41
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122,290,000	95,891,623	78.41
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65,000,000	44,958,722	69.17
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	57,290,000	50,932,901	88.90

Berdasarkan tabel diatas nilai Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 28.994.614.552,- (*Dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empatbelas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*) dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 27.538.123.224,- (*Dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh*

empat rupiah), dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2025 prosentase capaian anggaran sebesar 94,98%. Nilai ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan prosentase capaian anggaran sebesar 83,85%.

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak Dan Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,248	0,248	100,00%	1.770.013.000	1.582.191.923	89,39%	1,12
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,50	64,40	98,32%	2.412.240.000	2.277.248.000	94,40%	1,04
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,30	71,10	99,72%	373.183.485	316.874.473	84,91%	1,17
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	44,43	43,26	97,37%	257.771.900	78.573.000	30,48%	3,19
3	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	73,60	70,40	95,65%	11.066.996.000	10.864.440.900	98,17%	0,97
4	Terwujudnya Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,85	72,85	100,00%	13.114.410.167	12.418.794.928	94,70%	1,06

Catatan:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**

Tabel diatas menunjukkan bahwa perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran pada tujuan/sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai tingkat efisien.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			92,65	28,994,614,552	27,538,123,224	94,98	0,98
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			46,06	28,417,071,552	27,009,016,441	95,05	0,48
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			51,22	14,937,835,552	13,867,327,541	92,83	0,55
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			51,22	14,937,835,552	13,867,327,541	92,83	0,55
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			96,3	13,069,287,167	12,389,233,860	94,8	1,02
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	41,731,100	32,384,100	77,6	1,29
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100	15,314,700	13,084,700	85,44	1,17
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	4,980,700	1,929,700	38,74	2,58

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	4,660,800	1,452,800	31,17	3,21
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100	7,164,800	6,702,800	93,55	1,07
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	100	9,610,100	9,214,100	95,88	1,04
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			77,79	8,693,638,052	8,359,113,854	96,15	0,81
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	560 orang/Bulan	498 orang/Bulan	88,93	8,646,395,052	8,313,257,854	96,15	0,92
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	39,838,000	39,838,000	100	1,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100	180,000	180,000	100	1,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	100	4,774,000	3,424,000	71,72	1,39
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	0 Dokumen	0	2,451,000	2,414,000	98,49	0,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100	26,400,000	26,400,000	100	1,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100	26,400,000	26,400,000	100	1,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	330,580,416	279,679,601	84,6	1,18
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket	100	20,767,000	20,237,132	97,45	1,03
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	100	48,817,000	42,827,425	87,73	1,14
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100	35,010,000	33,825,366	96,62	1,03
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	100	121,368,000	90,427,618	74,51	1,34
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	100	63,722,416	61,880,358	97,11	1,03

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	11,000,000	1,980,000	18	5,56
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100	29,896,000	28,501,702	95,34	1,05
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	3,610,334,249	3,427,542,005	94,94	1,05
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100	5,000,000	5,000,000	100	1,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100	102,576,158	78,798,859	76,82	1,30
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan	100	723,720,000	702,200,000	97,03	1,03
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 orang/Bulan	24 orang/Bulan	100	2,779,038,091	2,641,543,146	95,05	1,05
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	366,603,350	264,114,300	72,04	1,39
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	100	91,866,600	85,667,000	93,25	1,07
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 unit	12 unit	100	239,021,750	144,126,000	60,3	1,66
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81 unit	81 unit	100	35,715,000	34,321,300	96,1	1,04
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			90,83	1,237,963,000	1,074,128,210	86,77	1,05
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			100	59,593,000	41,046,000	68,88	1,45
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	72 Orang	72 Orang	100	59,593,000	41,046,000	68,88	1,45

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			80	147,916,000	123,307,240	83,36	0,96
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	40 Organisasi	40 Organisasi	80	147,916,000	123,307,240	83,36	0,96
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			92,5	1,030,454,000	909,774,970	88,29	1,05
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	92,5	1,030,454,000	909,774,970	88,29	1,05
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			100	121,920,000	104,409,621	85,64	1,17
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			100	77,805,000	71,086,620	91,37	1,09
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Peran gkat Daerah	36 Perangkat Daerah	100	77,805,000	71,086,620	91,37	1,09
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	44,115,000	33,323,001	75,54	1,32
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	100	44,115,000	33,323,001	75,54	1,32
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			50	257,771,900	78,573,000	30,48	1,64
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	177,568,900	2,060,000	1,16	0,00

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0	177,568,900	2,060,000	1,16	0,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	80,203,000	76,513,000	95,4	1,05
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	800 Orang	800 Orang	100	80,203,000	76,513,000	95,4	1,05
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			0	0	0	0	0,00
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0,00
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	0 dokumen	0	0	0	0	0,00
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			12,5	14,642,000	14,642,000	100	0,13
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			25	11,700,000	11,700,000	100	0,25
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Dokumen	25	11,700,000	11,700,000	100	0,25
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			0	2,942,000	2,942,000	100	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	2,942,000	2,942,000	100	0,00

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	0 dokumen	0	0	0	0	0,00
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			8,89	236,251,485	206,340,850	87,34	0,10
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			16,67	132,940,000	121,279,850	91,23	0,18
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33	130,000,000	118,339,850	91,03	0,37
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0	2,940,000	2,940,000	100	0,00
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0,00
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	6 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	0	0	0,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10	103,311,485	85,061,000	82,33	0,12
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	40 Orang	0 Orang	0	88,400,000	70,150,000	79,36	0,00
	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	5 Kegiatan	1 Kegiatan	20	14,911,485	14,911,000	100	0,20
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			40,9	13,479,236,000	13,141,688,900	97,5	0,42

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			40,9	13,479,236,000	13,141,688,900	97,5	0,42
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			33,17	147,200,000	146,797,000	99,73	0,33
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			0	0	0	0	0,00
	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	0 Orang	0 Orang	0	0	0	0	0,00
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			66,33	147,200,000	146,797,000	99,73	0,67
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	172 Orang	172 Orang	100	59,000,000	58,597,000	99,32	1,01
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	796 Orang	260 Orang	32,66	88,200,000	88,200,000	100	0,33
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			81,21	10,919,796,000	10,717,643,900	98,15	0,83
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			75	543,600,000	484,658,900	89,16	0,84
	Pengendalian Program KKBPK	0 laporan	0 laporan	0	0	0	0	0,00
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	2 Laporan	1 Laporan	50	83,600,000	78,800,000	94,26	0,53

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	8 Laporan	8 Laporan	100	160,000,000	158,020,000	98,76	1,01
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Media	2 Media	100	100,000,000	88,478,900	88,48	1,13
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	100	0	0	0	0,00
	Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	12 laporan	12 laporan	100	200,000,000	159,360,000	79,68	1,26
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			99,93	9,827,550,000	9,739,699,000	99,11	1,01
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	31,800 orang/Bulan	31,758 orang/Bulan	99,87	9,698,550,000	9,610,699,000	99,09	1,01
	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1,290 Orang/Bulan	1,290 Orang/Bulan	100	129,000,000	129,000,000	100	1,00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			99,91	442,246,000	388,462,000	87,84	1,14
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Bulan	12 Bulan	100	46,800,000	16,600,000	35,47	2,82
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1,175 Orang	1,172 Orang	99,74	361,250,000	340,960,000	94,38	1,06

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	7 Kegiatan	14 Kegiatan	100	34,196,000	30,902,000	90,37	1,11
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			50	106,400,000	104,824,000	98,52	0,51
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	0,00
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	20 Kampung	20 Kampung	100	106,400,000	104,824,000	98,52	1,02
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			8,33	2,412,240,000	2,277,248,000	94,4	0,09
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			16,67	2,412,240,000	2,277,248,000	94,4	0,18
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	10 Unit	10 Unit	100	130,000,000	107,670,000	82,82	1,21
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	4	1	25	70,183,000	59,078,000	84,18	0,30
	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Orang	0 Orang	0	0	0	0	0,00

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	0,00
	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Orang	0 Orang	0	0	0	0	0,00
	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0,00	0,00
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	139,632 Orang	34,908 Orang	25	2,211,000,000	2,110,500,000	95,45	0,26
	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	0,00
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	0 Kelompok	0 Kelompok	0	1,057,000	0	0	0,00
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			0	0	0	0	0,00

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Organisasi	0 Organisasi	0	0	0	0	0,00
	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak			139,24	577,543,000	529,106,783	91,61	1,52
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	45,123,000	29,561,068	65,51	1,53
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	45,123,000	29,561,068	65,51	1,53
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100	45,123,000	29,561,068	65,51	1,53
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			219,38	410,130,000	403,654,092	98,42	2,23
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			219,38	410,130,000	403,654,092	98,42	2,23
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			293,75	180,130,000	180,130,000	100	2,94
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			145	230,000,000	223,524,092	97,18	1,49
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			98,33	122,290,000	95,891,623	78,41	1,25

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			98,33	122,290,000	95,891,623	78,41	1,25
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			96,67	65,000,000	44,958,722	69,17	1,40
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			100	57,290,000	50,932,901	88,9	1,12

Pada tabel diatas dapat terlihat efisiensi dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2025 secara keseluruhan mencapai tingkat 1% yang artinya capaian kinerja program dan kegiatan berada pada tingkat efisien.

Capaian kinerja program/kegiatan berada pada tingkat efisien karena mencapai nilai 1 yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (tingkat efisiensi 1,02); Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (tingkat efisiensi 1,05); Program Perlindungan Perempuan (tingkat efisiensi 1,17%); Program Peningkatan Kualitas Keluarga (tingkat efisiensi 1,64);

Beberapa capaian kinerja program/kegiatan berada pada tingkat tidak efisien karena tidak mencapai nilai 1 yaitu : Program Pemenuhan Hak Anak (tingkat efisiensi 0,13); Program Perlindungan Khusus Anak (tingkat efisiensi 0,10); Program Pengendalian Penduduk (tingkat efisiensi 0,33); Program Pembinaan Keluarga Berencana (tingkat efisiensi 0,83); dan Program Pemberdayaan dan

Peningkatan Keluarga Sejahtera (tingkat efisiensi 0,09). Sementara Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (tingkat efisiensi 0).

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja DP3AP2KB Kota Cilegon dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 DP3AP2KB Kota Cilegon menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) indikator kinerja dan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan DP3AP2KB Kota Cilegon adalah Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak dan Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dengan capaian kinerja sebesar 100% (Kategori Baik)
 - b. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan capaian kinerja sebesar 98,32% (Kategori Baik)
2. Sasaran 1 adalah Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
 - a. Indeks Perlindungan Anak (IPA) dengan capaian kinerja sebesar 99,72% (Kategori Baik)
 - b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan dengan capaian kinerja sebesar 97,37% (Kategori Baik)
3. Sasaran 2 adalah Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu :
 - a. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dengan capaian kinerja sebesar 95,65% (Kategori Baik)
4. Sasaran 3 adalah Terwujudnya Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu :
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100% (Kategori Baik)

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja seluruh indikator utama seluruhnya telah mencapai kategori baik.

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada DP3AP2KB Kota Cilegon dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **28.994.614.552,-** (*Dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empatbelas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*) dengan realisasi anggaran mencapai Rp. **27.538.123.224,-** (*Dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*), dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2025 prosentase capaian anggaran sebesar **94,98%** dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1% yang berarti DP3AP2KB Kota Cilegon telah melaksanakan kinerja dan anggaran dengan efisien.

B. Saran

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DP3AP2KB Kota Cilegon kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Cilegon. Diharapkan kinerja selanjutnya dapat lebih baik dengan melakukan perbaikan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diantaranya dengan :

1. Mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
2. Mengoptimalkan upaya Perlindungan terhadap Perempuan, Perlindungan terhadap Anak dan terpenuhinya hak anak secara komprehensif;
3. Mengoptimalkan pemerataan pelayanan KB dan pembangunan keluarga;

4. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel agar berdampak terhadap meningkatnya kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
5. Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektoral baik dengan Perangkat Daerah maupun pihak lain yang memiliki tujuan yang sama;
6. Melakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala dan terukur untuk mengetahui pencapaian setiap program dan kegiatan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Cilegon, 30 Januari 2026

KEPALA DP3AP2KB KOTA CILEGON



Hj. Lia Nurlia Mahatma, ST., M.Si.

NIP. 19710708 199703 2 005

Pembina Utama Muda/IV.c

LAMPIRAN

KEGIATAN BIDANG P2KB
(PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)

**Penyuluhan KB
Posyandu Mawar Pabean**



**PEMBEKALAN POKJA KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS
KOTA CILEGON TAHUN 2025**

KEGIATAN BIDANG KSPK
(KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA)



BIDANG PPK
(PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA)



BIDANG PPA
(PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)



DP3AP2KB KOTA CILEGON
TURUT MEMERIAHKAN
HARI ANAK NASIONAL
Kota Cilegon, 23 Juli 2025

KEGIATAN BIDANG SEKRETARIAT



KEGIATAN UPTD PELAYANAN PPA



KEGIATAN UPTD PELAYANAN KB

Mini Lokakarya Stunting Kec. Gerogol



Mini Lokakarya Kec. Ciwandan



Mini Lokakarya Stunting Kec. Citangkil





PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Gedung Graha Edhi Praja Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp/Fax (0254) 395008
CILEGON - BANTEN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA CILEGON

NOMOR : 000.8/Kep.15-SEKRT/2025

TENTANG

TIM KERJA PENYUSUNAN LKIP

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (1) Pasal 9 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 17 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dan dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dipandang perlu membentuk Tim Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas DP3AP2KB tentang Tim Kerja Penyusunan LKIP;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 17 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan LKIP dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi meliputi :
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;
 - b. menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. memberikan arahan terpadu, input, dan umpan balik atas pelaksanaan kegiatan;
 - d. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar tim; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim.
2. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan peta jalan dan rencana kerja;
 - b. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan dengan strategi dan tujuan organisasi;
 - c. memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan sumberdaya yang optimal;
 - d. memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif; dan
 - e. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit organisasi.
3. Tugas dan tanggung jawab Ketua Tim meliputi:
 - a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - d. memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
 - e. melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada pejabat penilai kinerja dan pimpinan unit organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional dan pelaksana; dan
 - f. melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar anggota tim.

4. Tugas dan tanggung jawab anggota tim meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja individu;
 - b. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan
 - c. melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 2 Januari 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana



Hj. Lia Nurlia Mahatma, ST, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197107081997032005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA CILEGON
NOMOR 000.8/Kep.15-SEKRT/2025
TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN LKIP PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SUSUNAN TIM KERJA

Pimpinan Unit Organisasi	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
Pejabat Penilai Kinerja	:	Sekertaris DP3AP2KB
Ketua	:	Ella Hayati,S.Kp. M.Pd (Perencana Ahli Pertama)
Anggota	:	1. Iyah Sulasiah,SHI.M.Si (Perencana Ahli Muda) 2.Kepala Bidang Program Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada DP3AP2KB 3.Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Khusus dan Pengelolaan Sistem Data pada DP3AP2KB 4.Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada DP3AP2KB 5.Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada DP3AP2KB 6.Kepala UPTD Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3AP2KB

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana



Hi Lia Nurliha Mahatma, ST, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197107081997032005

MATRIKS RENSTRA

Tabel *Cascading* Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan / Subkegiatan DP3AP2KB Kota Cilegon

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
- S.1.2 - Terwujudnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing - S.6.3 - Meningkatnya kesejahteraan keluarga - S.3.2 - Meningkatnya kualitas penerapan gaya hidup sehat masyarakat - S.4.3 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN ANAK DAN TERWUJUDNYA KELUARGA YANG BERKUALITAS				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ((%) Indeks)		
					Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)		
		Terwujudnya Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)		
					Indeks Pelayanan Publik (poin)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.08.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Persentase lembaga penyediaan layanan perlindungan anak yang aktif dan sesuai standar (%)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Capaian Kinerja Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.08.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.08.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.08.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan ((%) Indeks)		
					Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Capaian Kinerja Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Capaian Kinerja Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.02.2.03.0009 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Capaian Kinerja Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Capaian Kinerja Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	2.08.04.2.01.0005 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	
					proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Capaian Kinerja Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Capaian Kinerja Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Capaian Kinerja Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif dan sesuai standar (%)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Capaian Kinerja Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Capaian Kinerja Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Daerah Kabupaten/Kota			
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	2.08.07.2.01.0011 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Capaian Kinerja Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	
		Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas			Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Persentase lembaga penyediaan layanan perlindungan anak yang aktif dan sesuai standar (%)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Capaian Kinerja Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Capaian Kinerja Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	
					Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	2.14.02.2.02.0022 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Proporsi Kampung KB Mandiri (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK	
					Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Capaian Kinerja Kegiatan Pengendalian Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
					Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesetaraan KB Pria	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		Persentase Anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKA/UPPKS yang ber-KB (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Indeks Pengasuhan Remaja (Indeks)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	2.14.04.2.01.0023 - Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	2.14.04.2.01.0025 - Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
2.08.2.14.0.00.02.0001 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak							
- S.6.3 - Meningkatnya kesejahteraan keluarga - S.3.2 - Meningkatnya kualitas penerapan gaya hidup sehat masyarakat - S.4.3 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - S.1.2 - Terwujudnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing	MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN ANAK DAN TERWUJUDNYA KELUARGA YANG BERKUALITAS	Terwujudnya Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kota (Orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak				
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan				
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak				
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan				
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak				
2.08.2.14.0.00.02.0002 - UPTD Keluarga Berencana							
<ul style="list-style-type: none"> - S.3.2 - Meningkatkan kualitas penerapan gaya hidup sehat masyarakat - S.1.2 - Terwujudnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing - S.6.3 - Meningkatkan kesejahteraan keluarga - S.4.3 - Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 	MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN ANAK DAN TERWUJUDNYA KELUARGA YANG BERKUALITAS	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan				

Sumber : <https://sipd.go.id>

Tabel Indikator Kinerja Utama Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,248	0,247	0,246	0,244	0,242	0,240	
2.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64.40:65.50	65.50:66.60	66.60:67.70	67.70:68.90	68.90:70.10	70.10:71.30	
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	44,43	45,34	46,38	47,42	48,46	49,5	
4.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71,3	71,7	72,1	72,5	72,9	73,3	
5.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	73,6	76,9	80,5	84,1	88	90	
6.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	72,85	74	75,15	76,3	77,45	78,6	

Tabel Indikator Kinerja Kunci Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
4.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	9.1-8.0	8.0-7.1	7.1-6.3	6.3-5.5	5.5-4.9	4.9-4.3	
5.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Rata-rata Anak per Wanita	2.08	2.08	2.07	2.07	2.07	2.07	
6.	Presentase Anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKA yang ber-KB	Persentase	87.60	87.71	87.81	87.91	88.02	88.12	



WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 800.05/Kep.203-Org/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2025-2029

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Kota Cilegon 2025-2029, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cilegon, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2025-2029

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 807);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 123);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 127);
14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tahun 2025-2029, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama pada Lampiran I sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Wali Kota.

KETIGA ...

KETIGA : Indikator Kinerja Utama pada Lampiran II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan digunakan sebagai Pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 10 September 2025

WALI KOTA CILEGON,



ROBINSAR

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektur Daerah Kota Cilegon
3. Yth. Kepala BPKPAD Kota Cilegon
4. Kepala Perangkat Daerah terkait

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 800.05/Kep.203-Org/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON
TAHUN 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
T.1 - Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan inklusif		Indeks Pendidikan	Poin	$\text{Indeks Pendidikan} = (\text{IHLS} + \text{IRLS})/2$ $\text{IHLS (Indeks Harapan Lama Sekolah)} = (\text{HLS} - 0) / (18-0)$ <p>* batas maksimum HLS ditetapkan 18 tahun, setara pendidikan S1</p> $\text{IRLS (Indeks Rata-rata Lama Sekolah)} = (\text{RLS} - 0) / (15-0)$ <p>* batas maksimum RLS ditetapkan 15 tahun, setara SMA</p>

	S.1.1 - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang merata	Angka Partisipasi PAUD	Persen	Angka Partisipasi PAUD (%) = $\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang ikut PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun}} \times 100\%$
		Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	Persen	Angka Partisipasi Pendidikan Dasar (%) = $\frac{\text{Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sedang bersekolah}}{\text{Jumlah anak usia 7-15 tahun}} \times 100\%$
		Angka Partisipasi Kesetaraan	Persen	Angka partisipasi pendidikan kesetaraan (%) = $\frac{\text{jumlah peserta program kesetaraan}}{\text{jumlah populasi yang memenuhi syarat}} \times 100\%$
	S.1.2 - Terwujudnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	Poin	$IPP = 0,20 \times (\text{Pendidikan} + \text{Kesehatan} + \text{Ketenagakerjaan} + \text{Partisipasi} + \text{Gender})$
	S.1.3 - Meningkatkan budaya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Poin	$IPLM = (\text{Skor_Ketersediaan} \times 0,25) + (\text{Skor_Aksesibilitas} \times 0,25) + (\text{Skor_Kualitas} \times 0,25) + (\text{Skor_Budaya_Baca} \times 0,25)$
	T.2 - Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Diukur berdasarkan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto secara riil atau PDRB ADHK (menghilangkan faktor inflasi).

				$\text{Pertumbuhan Ekonomi (\%)} = (\text{PDRB ADHK Tahun } n - \text{PDRB ADHK Tahun } n-1 / \text{PRDB ADHK Tahun } n-1) \times 100$
	S.2.1 - Terwujudnya ekosistem dan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan realisasi investasi	Persen	$\text{Pertumbuhan Investasi (\%)} = (\text{Realisasi Investasi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } n-1) \times 100$
	S.2.2 - Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$\text{TPT (\%)} = (\text{Jumlah Penganggur Terbuka} / \text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%$
T.3 - Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Perhitungan UHH menggunakan tabel hidup (life table) yang diukur oleh BPS setiap tahunnya.
	S.3.1 - Terwujudnya Layanan Kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau	Indeks Pelayanan Publik di bidang pelayanan kesehatan (poin)	Poin	<p>Setiap indikator dinilai dalam bentuk skor kuantitatif oleh responden (masyarakat pengguna layanan).</p> $\text{IPP} = (\sum ni / n) \times 100$
	S.3.2 - Meningkatnya kualitas penerapan gaya hidup sehat masyarakat	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	Persen	<p>Rumus Perhitungan Persentase PHBS:</p> $\text{Persentase PHBS (\%)} = (\text{Jumlah rumah tangga yang menerapkan seluruh indikator PHBS} / \text{Jumlah seluruh rumah tangga yang di survei}) \times 100$
T.4 - Terwujudnya		Indeks Reformasi	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan

birokrasi bersih, akuntabel dan berintegritas tinggi		Birokrasi		melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	S.4.1 - Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Poin	Rasio Kemandirian Fiskal (%) = $(\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} / \text{Total Pendapatan}) \times 100$
	S.4.2 - Terwujudnya transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	Perhitungan Skor DGI = $\sum(\text{Nilai Subkomponen} \times \text{Bobotnya})$ Total skor berada dalam rentang 0–100.
	S.4.3 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip	Nilai	Berdasarkan penilaian kemenpan-RB atas implementasi Sakip Pemerintah Daerah
	S.4.4 - Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan dan kolaborasi pemerintah daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	Metode Penghitungan IKK 1. Dilakukan dengan self-assessment oleh instansi pemerintah. 2. Objek penilaian: kebijakan pembangunan strategis yang sudah diimplementasikan minimal 3 tahun terakhir. 3. Instrumen penilaian menggunakan kuisisioner digital berbasis web (Sistem

				<p>Informasi IKK – LAN).</p> <p>Skor dihitung dengan metode weighted scoring, lalu dikategorikan dalam predikat kualitas.</p> <p>Kategori Nilai IKK :</p> <p>91,00 – 100 : Unggul</p> <p>80,00 – 90,99 : Sangat Baik</p> <p>65,00 – 79,99 : Baik</p> <p>50,00 – 64,99 : Cukup</p> <p>< 50,00 : Kurang</p>
T.5 - Terwujudnya kota layak huni dan berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni (livable city index)	Poin	<p>Cara penghitungan :</p> <p>1. Nilai per Indikator</p> <p>Setiap indikator diberi skor antara 0–100 berdasarkan capaian aktual dibandingkan standar.</p> <p>Standar ditetapkan dalam lampiran Permen berdasarkan tipe kota.</p> <p>2. Hitung Nilai per Dimensi</p> <p>Skor Dimensi= ($\sum$Skor indikator pada dimensi)/(Jumlah Indikator)</p> <p>3. Hitung Indeks Kota Layak Huni</p> <p>$IKLH = \sum_{i=1}^6 \left[\left(\text{Skor Dimensi "i"} \times \text{Bobot i"} \right) \right]$</p>
	S.5.1 - Terwujudnya infrastruktur layanan	Indeks Infrastruktur	Angka	Indeks Infrastruktur adalah indikator komposit yang digunakan untuk

	perkotaan yang inklusif, modern dan terintegrasi			<p>mengukur kualitas dan kinerja infrastruktur di suatu daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek infrastruktur, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jaringan dan Jalan: Kondisi dan aksesibilitas jalan.- Angkutan Umum: Ketersediaan dan kualitas layanan transportasi publik.- Air Bersih: Akses terhadap air bersih yang layak konsumsi.- Sanitasi: Ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai.- Listrik: Akses terhadap pasokan listrik yang stabil.- Telekomunikasi: Ketersediaan dan kualitas layanan komunikasi dan internet. <p>Pengukuran Indeks Infrastruktur dilakukan dengan menghitung rata-rata geometrik dari nilai indeks masing-masing komponen infrastruktur. Nilai indeks berkisar antara 0 hingga 100, di mana nilai mendekati 100 menunjukkan kondisi infrastruktur yang baik, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan kondisi yang buruk.</p>
--	--	--	--	---

	S.5.2 - Meningkatkan keselarasan ruang dan berkembangnya kawasan strategis daerah	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	$\text{PKPR (\%)} = (\text{Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR}) / (\text{Total luas pemanfaatan ruang eksisting}) \times 100\%$ <p>RTR = Rencana tata ruang yang berlaku (RTRW/RDTR)</p>
	S.5.3 - Berkurangnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	$\text{Indeks Resiko Bencana (IRB)} = \text{Ancaman} \times \text{Kerentanan} / \text{Kapasitas}$ <p>Kategori Nilai IRB (BNPB)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,00 – 0,25 : Risiko Rendah - 0,26 – 0,50 : Risiko Sedang - 0,51 – 1,00 : Risiko Tinggi
	S.5.4 - Meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	$\text{IKLH} = (35\% \times \text{IKA}) + (35\% \times \text{IKU}) + (30\% \times \text{ITL})$ <p>keterangan :</p> <p>IKA : Indeks Kualitas Air</p> <p>IKU : Indeks Kualitas Udara</p> <p>ITL : Indeks Tutupan Lahan</p> <p>Nilai IKLH disajikan dalam skala 0–100, dengan interpretasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ≥ 80 : Baik (Lingkungan sangat mendukung kehidupan) - 60 – 79 : Sedang (lingkungan cukup mendukung) - < 60 : Buruk (Lingkungan tidak

				mendukung secara optimal)
	S.5.5 - Meningkatnya keamanan dan kondusivitas daerah	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	Proporsi Rasa Aman= (Jumlah penduduk usia > 15 tahun yang merasa aman berjalan sendirian / jumlah total penduduk usia > 15 tahun) x 100%
	S.5.6 - Terwujudnya pemerataan pembangunan potensi kewilayahan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	Presentase Kelurahan Cepat Berkembang (%) = (Jumlah kelurahan atau desa kategori "Cepat Berkembang") / (Total kelurahan atau desa) x 100%
T.6 - Pemerataan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan	Persen	<p>Tingkat kemiskinan = Jumlah penduduk miskin / Jumlah penduduk x 100%</p> <p>Ket :</p> <p>Penduduk miskin : penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan</p> <p>Jumlah penduduk : seluruh penduduk di Kota Cilegon pada periode tertentu</p> <p>Garis Kemiskinan (GK) : nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (setara 2100 kkal/kapita/hari) dan kebutuhan dasar non-makanan</p>

	S.6.1 - Meningkatnya perlindungan sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	Indikator ini diukur dari 3 dimensi yaitu : 1) dimensi kebutuhan dasar (bobot 27%) yang meliputi pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan 2) dimensi peranan sosial (bobot 31%) yang meliputi partisipasi, kohesi sosial dan kelembagaan inklusi 3) dimensi keberdayaan ekonomi (bobot 41%) yang meliputi partisipasi dalam aktifitas ekonomi, utilitas/daya guna, ketahanan ekonomi.
	S.6.2 - Meningkatnya Daya Beli dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Daya Beli Masyarakat	Ribu Rupiah	Diukur oleh BPS sebagai indikator pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM)
	S.6.3 - Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator yang diukur berdasarkan data dari Formulir Pendataan Keluarga (PK). Penghitungan iBangga dilakukan dengan memberikan skor 1 untuk variabel yang terpenuhi dan 0 untuk yang tidak, kemudian dihitung rata-rata skor per dimensi dan dikonversi menjadi nilai indeks antara 0 hingga 100. Kategori Nilai iBangga : - Kurang Baik (Rentan): Nilai iBangga < 40 - Cukup Baik (Berkembang): Nilai

				iBangga 40–70 - Baik (Tangguh): Nilai iBangga > 70
--	--	--	--	---

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 800.05/Kep.203-Org/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
CILEGON TAHUN 2025-2029

1. SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengevaluasi dua komponen utama: Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results), yang masing-masing memiliki bobot dalam total nilai IRB. Komponen Pengungkit meliputi area seperti manajemen perubahan dan SDM aparatur, sementara Komponen Hasil mencakup akuntabilitas kinerja, kualitas layanan publik, pemerintahan bersih, dan kinerja organisasi. Penilaian dilakukan melalui survei eksternal dan penilaian mandiri yang kemudian diolah menggunakan formula tertentu oleh evaluator Kementerian PANRB untuk menghasilkan nilai akhir IRB

	Terwujudnya Kinerja Perangkat daerah yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Birokrasi Daerah	Reformasi Perangkat	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kebijakan	Kualitas	Poin	<p>Perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan oleh LAN RI meliputi aspek-aspek penting dalam siklus kebijakan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kebijakan: Relevansi kebijakan dengan permasalahan yang ada dan kebutuhan masyarakat. 2. Implementasi Kebijakan: Efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuannya. 3. Evaluasi Kebijakan: Seberapa baik kebijakan dievaluasi, termasuk dampak positif dan negatifnya. 4. Transparansi dan Partisipasi: Tingkat keterlibatan masyarakat dan keterbukaan dalam proses kebijakan. <p>Dengan Interval Nilai 0 - 100 dengan urutan predikat Unggul-Sangat Baik- Baik- Cukup - Kurang</p>

2. INSPEKTORAT

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Maturitas SPIP = (Total Skor Hasil Evaluasi / Skor Maksimal) x 100%
	Meningkatnya Prosentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Temuan BPK Perwakilan Provinsi Banten	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / Jumlah total rekomendasi) x 100%
	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Maturitas SPIP = (Total Skor Hasil Evaluasi / Skor Maksimal) x 100%
	Meningkatnya	Kapabilitas Aparat	Level	Hasil Evaluasi Capaian Kapabilitas APIP yang

	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		dilakukan oleh BPKP berdasarkan 6 elemen penilaian meliputi: 1. Pengelolaan SDM; 2. Praktek Profesional; 3. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 4. Budaya dan Hubungan Organisasi; 5. Struktur Tata Kelola; 6. Peran dan Layanan APIP
	Terwujudnya kinerja Inspektorat yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

3. SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Tingkat kepuasan = $\frac{\text{Skor jawaban seluruh responden}}{(\text{Jml Pertanyaan} \times \text{Jml Respon})} \times 100$
	Terwujudnya kualitas perumusan kebijakan DPRD dan kolaborasi pemerintah daerah.	Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	Perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan oleh LAN RI, meliputi aspek-aspek penting dalam siklus kebijakan, seperti: 1. Perencanaan Kebijakan: Relevansi kebijakan dengan permasalahan yang ada dan kebutuhan masyarakat. 2. Implementasi Kebijakan: Efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuannya. 2. Evaluasi Kebijakan: Seberapa baik kebijakan dievaluasi, termasuk dampak positif dan negatifnya. 3. Transparansi dan Partisipasi: Tingkat keterlibatan masyarakat dan keterbukaan dalam proses kebijakan.

				Dengan Interval Nilai 0 - 100 dengan urutan predikat Unggul-Sangat Baik- Baik- Cukup - Kurang
	Terwujudnya kinerja sekretariat DPRD yang akuntabel dan profesional	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RISET DAN INOVASI DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	Indek Perencanaan Pembangunan = Nilai Sinergi (32) + Kualitas Perencanaan (58) + Keterhubungan (10)
		Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	PKBB = (Jumlah kebijakan, program, atau regulasi yang disusun)/(analisis kebijakan, atau hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis) x 100
	Terwujudnya Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi yang berkualitas	Indeks Inovasi Daerah	Poin	Indeks Inovasi Daerah = (Skor Total)/(Skor Maksimum) x 100
	Terwujudnya kinerja Bappedarida yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti

				peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya Sinergi, Kualitas Perencanaan dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan Dengan Perencanaan Kinerja	Nilai komponen sinergi pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	Penjumlahan nilai bobot Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN (9) + Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP (13) + Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk membiayai Program Prioritas Nasional/Major Project dalam Dokumen RKPD (10)
		Nilai komponen kualitas perencanaan pada indeks perencanaan pembangunan daerah	Poin	Penjumlahan nilai bobot Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/Proyek (49) + Inovasi Perencanaan pembangunan (9)
		Nilai komponen keterhubungan pada indeks perencanaan pembangunan daerah	Poin	Apabila Target dan sasaran pembangunan daerah yang cascade dengan target dan sasaran kinerja lembaga terkait maka nilai (10)

5. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun N-1
	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Profesional	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	$P \text{ tepat waktu} = (L \text{ tepat waktu} / L \text{ total}) \times 100\%$ <p>P. Tepat waktu = Persentase laporan yang diserahkan tepat waktu (%) L. Tepat Waktu = Jumlah laporan keuangan yang diserahkan tepat waktu L. Total - Jumlah total laporan keuangan yang diharapkan diserahkan</p>
	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	<p>Penambahan Nilai Aset Tetap tahun N dibandingkan dengan Tahun N-1 apabila data belum tersedia, maka menggunakan data tahun sebelumnya</p> $P \text{ Penambahan aset tetap} = (A \text{ akhir} - A \text{ awal}) / A \text{ awal} \times 100\%$

	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel dan Profesional	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	Realisasi PAD tahun N-1 terhadap realisasi Pendapatan Daerah tahun N-1 $\text{Persentase PAD} = (\text{PAD} / \text{Pendapatan daerah}) \times 100\%$ $\text{P.PAD} = \text{Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (\%) PAD} = \text{Pendapatan Asli Daerah}$ $\text{Pendapatan Daerah} = \text{Total Pendapatan Daerah}$
	Terwujudnya Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

6. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional, dan berintegritas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan		Indeks Merit System	Poin	Indeks Merit System : Akumulasi atau jumlah dari skor/nilai dari tim penilai mandiri yang telah diverifikasi oleh KASN, dari aspek-aspek di bawah ini, sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019: - Perencanaan Kebutuhan & Standardisasi Jabatan (10%) - Manajemen Talenta (20%) - Pengelolaan Kinerja (14%) - Pengembangan Kompetensi (16%) - Penguatan Budaya Kerja & Citra Institusi (10%) - Penghargaan & Pengakuan (10%) - Disiplin, Pemberhentian, & Upaya Administratif (10%) - Digitalisasi Manajemen ASN (10%)
	Terwujudnya tata kelola ASN yang berkualitas melalui	Indeks implementasi NSPK Manajemen ASN	Poin	Formulasi penghitungan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN berdasarkan rumus pengolahan hasil yang terdapat pada sistem

	peningkatan kompetensi, penilaian kinerja yang akuntabel, dan penegakan kode etik serta disiplin kerja.			aplikasi indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN. Dengan kategori Nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat Unggul; Nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat Baik; Nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat Cukup; Nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat Kurang; dan Nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat Buruk.
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019. Penilaian IP ASN mencakup sejumlah aspek yang bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kedisiplinan ASN, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai profesionalitas aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Rumusnya adalah : $IP\ ASN = (0,30 \times \text{Kualifikasi}) + (0,30 \times \text{Kompetensi}) +$

				(0,40×Kinerja)-(Disiplin)
	Terwujudnya kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akuntabel dan profesional.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

7. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM		Indeks Demokrasi Indonesia	Persen	Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten berdasarkan hasil rilis tahun terakhir
	Meningkatnya Kinerja Badan Kesbangpol yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	Nilai Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) yang diperoleh dari Ditjen Polpum Kemendagri yang terdiri dari dimensi aspek Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Keberagaman berdasarkan hasil rilis tahun terakhir

8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Berkurangnya Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	$\text{Risiko Bencana} = \text{Ancaman} \times (\text{Kerentanan/Kapasitas})$
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	Berdasarkan Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dari Tim Evaluator

9. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Inklusif dan Terintegrasi		Indeks Infrastruktur	Angka	Jumlah capaian infrastruktur jalan, air minum, drainase, air limbah domestik, gedung negara, dan bangunan pengendali banjir dibagi jumlah sektor infrastruktur.
	Meningkatnya kinerja dinas PUPR yang profesional dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang berkualitas.	Rasio kemantapan jalan	Persen	Panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) berbanding total panjang jalan kota.
		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi	Persen	Jumlah rumah tangga atau jumlah KK yang memiliki akses aman dan layak dibagi dengan jumlah total rumah tangga atau KK di Kota Cilegon

		(Air Limbah Domestik Layak dan Aman)		
		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir.	Persen	Luas kawasan permukiman yang terlindungi dari banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten /kota (%)	Persen	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM (jiwa) dibagi dengan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM (jiwa)) dikalikan seratus persen
		Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	Panjang drainase dalam kondisi baik dibagi dengan panjang total drainase dikali seratus persen
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.	Persen	Luas pemanfaatan ruang di Lahan Terbangun yang sesuai dengan RTRW dibagi Total Luas pemanfaatan ruang yang Terbangun pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

		Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Persen	Jumlah kegiatan konstruksi yang diawasi dibandingkan dengan total kegiatan konstruksi yang direncanakan
		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik.	Persen	Jumlah bangunan gedung negara yang dalam kondisi baik dibagi dengan jumlah total bangunan gedung negara milik pemerintah kota cilegon
		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	Luas kawasan perkotaan yang ditata dibagi dengan luas wilayah berdasarkan RTBL Kota Cilegon dikalikan seratus persen

10. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan merata		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah 15+ $\bar{X}_{15+} = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> • P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas • x_i = Lama sekolah penduduk ke-i
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	HLS = Σ (Jumlah penduduk usia i yang bersekolah / Jumlah penduduk usia i) x 1 tahun; i mewakili kelompok usia mulai dari usia minimum hingga usia maksimum yang dihitung
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	

				<p>IPK =</p> $IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times \text{Indeks } D_j)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">• IPK= Indeks Pembangunan Kebudayaan• W_j= Bobot dimensi ke-j• D_j= Dimensi ke-j <p>Rumus menghitung indeks dimensi (D_j):</p> $\text{Indeks } D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n_j} SK_{ij}}{n_j} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">• D_j= Dimensi ke-j• SK_{ij}= Nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi• n_j= Jumlah indikator pada dimensi ke-j
--	--	--	--	---

	Perangkat daerah yang Akuntabel dan Profesional	Birokrasi Perangkat Daerah		melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya Tata Kelola Pendidikan yang Berkualitas	Angka Partisipasi PAUD	Persen	Angka Partisipasi PAUD (%) = (Jumlah anak usia 5 - 6 tahun yang ikut PAUD / Jumlah anak usia 5 - 6 tahun) x 100%
		Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	Persen	Angka Partisipasi Pendidikan Dasar (%) = (Jumlah anak usia 7 - 15 tahun yang sedang bersekolah / Jumlah anak usia 7 - 15 tahun) x 100%
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	Persen	Angka partisipasi pendidikan kesetaraan (%) = (jumlah peserta program kesetaraan / jumlah populasi yang memenuhi syarat) x 100%
	Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan yang Dikembangkan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Persen	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dibagi Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditargetkan di tahun n dikali 100%

11. DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Usia Harapan Hidup (UHH) Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau <i>Mortpack</i>
	Terwujudnya Layanan Kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau	Indeks Pelayanan Publik di bidang pelayanan kesehatan	Poin	$IPP = 0,24 * \text{skor aspek kebijakan pelayanan} + 0,25 * \text{skor aspek profesionalisme} + 0,18 * \text{skor aspek sarana prasarana} + 0,11 * \text{skor aspek sistem informasi pelayanan publik} + 0,1 * \text{skor nilai konsultasi dan pengaduan} + 0,12 * \text{skor nilai inovasi pelayanan}$ Skor aspek adalah jumlah skor indikator pada masing-masing aspek, dengan bobot nilai indikator sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kategori indeks pelayanan publik : 0,00 - 1,00 , kategor F, makna gagal 1,01 - 1,50, kategori E, makna sangat buruk 1,51 - 2,00, kategori D, makna buruk 1,51 - 2,00, kategori C-, makna cukup (dengan catatan) 2,51 - 3,00, kategori C, makna cukup

				<p>3,01 - 3,50. kategoir B-, makna baik (dengan catatan)</p> <p>3,51 - 4,00, kategori B, makna baik</p> <p>4,01 - 4,50, kategori A-, makna sangat baik</p> <p>4,51- 5,00, kategori A, makna pelayanan prima</p>
	Meningkatnya kualitas penerapan gaya hidup sehat masyarakat	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	Persen	(Jumlah masyarakat usia > 7 tahun yang menerapkan perilaku hidup sehat sesuai DO / jumlah total peserta survei) x 100%
	Terwujudnya kinerja Dinas Kesehatan yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

12. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya peningkatan unsur pembangunan literasi masyarakat dan tata kelola arsip yang sesuai kaidah kearsipan		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	<p>Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) 1-7 = total jumlah variabel komponen pembentuk indeks unsur pembangun literasi masyarakat dari masing-masing jenis perpustakaan (kab/kota, kec/kelurahan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan khusus) dibagi dengan komponen aspek masyarakat lalu dibagi lagi dengan standarisasi sesuai dengan UPLM yang dihitung dan untuk penghitungan IPLM Kabupaten/Kota diperoleh dari hasil jumlah total UPLM 1-7 dibagi 7 dikali 100</p> <p>Catatan: Penghitungan IPLM terdiri dari 7 Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1); Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM 2); ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3); Tingkat kunjungan masyarakat (UPLM 4); Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (UPLM 5); Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan (UPLM 6); dan Jumlah Anggota</p>

				Perpustakaan (UPLM 7)
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	<p>Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan = Nilai pengawasan kearsipan eksternal ditambah Nilai pengawasan kearsipan internal</p> <p>Keterangan : Nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal (yang dikali bobot 60 %) ditambah nilai hasil pengawasan kearsipan internal (yang dikali bobot 40 %)</p>
	Terwujudnya kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya literasi masyarakat secara komprehensif dan pelestarian naskah kuno yang berkelanjutan	Tingkat pertumbuhan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Persen	<p>Pertumbuhan pertumbuhan kunjungan (%) = $((\text{Nilai Tahun N} - \text{Nilai Tahun N-1}) / \text{Nilai Tahun N-1}) * 100$</p> <p>Keterangan : Jumlah kunjungan onsite dan/atau online masyarakat Kota Cilegon ke perpustakaan di tahun berkenaan dikurangi di tahun</p>

				sebelumnya lalu dibagi tahun sebelumnya dikali 100. (Jenis Perpustakaan : Umum, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Khusus)
	Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung ketersediaan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	Formulasi : $\text{Tingkat ketersediaan arsip} = \frac{\text{Hasil perhitungan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional}}{\text{Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip}} \times 100$

13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	Memakai Perhitungan IKLH Kota $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ Ket : - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
		Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	((Emisi GRK Tahun Dasar - Emisi GRK Tahun Pelaporan) / Aktivitas Tahun Dasar) x 100%.
	Terwujudnya Kinerja DLH yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Lahan serta menurunnya Emisi GRK.	Indeks Kualitas Air	Indeks	IKA Kab/Kota = $\frac{\sum_i^T \text{IKA Titik Pantau}}{\text{Jumlah Titik Pantau}}$ IKA = Indeks Kualitas Air n = Jumlah parameter kualitas air i = indeks
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	$IKU = 100 - \left[\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right]$ IKU = indeks kualitas udara Ieu = indeks udara EU
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	Nilai yang menggambarkan kualitas lahan, yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
		Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	Persen	$\%PEt = PEt / Ebt$ %PEt = persentase penurunan emisi GRK total sektoral daerah pada tahun t PEt = penurunan emisi GRK total sektoral tahun t Ebt = emisi GRK total sektoral baseline tahun t

				t = tahun perhitungan
		Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	Persen	$\%PEK = \frac{\sum_{i = \text{base year}}^t PE_t}{\sum_{i = \text{base year}}^t EB_t}$ <p>%PEK = persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif</p> <p>$\sum_{i = \text{base year}}^t PE_t$ = akumulasi penurunan emisi GRK total</p> <p>daerah selama periode base year hingga tahun t</p> <p>$\sum_{i = \text{base year}}^t EB_t$ = akumulasi emisi GRK total baseline</p> <p>daerah selama periode base year hingga tahun t</p> <p>t = titik tahun perhitungan i = base year tahun 2010</p>

14. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak Dan Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	<p>Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki</p> $G_L = \sqrt{\left[\frac{0,005}{MFP} + \frac{0,01}{MHPK20} \right] + (PR_L \times SE_L)^2} \times TPAK_L$ $G_P = \sqrt{\left[1 \times (PR_P \times SE_P)^2 \right] + TPAK_P}$ <p>2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik</p> $HARM(G_P, G_L) = \left[\frac{(G_P)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ <p>3. Menghitung indeks masing – masing dimensi</p> $IKR = \left[\frac{\left[\frac{0,005}{MFP} + \frac{0,01}{MHPK20} \right] + 1}{2} \right]$ $IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP = \left[\frac{\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}}{2} \right]$ <p>4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik</p> $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ <p>5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender</p> $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ <p>6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender</p> $IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> G_L = Indeks Perempuan G_P = Indeks Laki-laki MFP = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup layak di tingkat kesehatan MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama bernilai kurang dari 20 tahun PR_L = Persentase perempuan di tingkat PR_P = Persentase laki-laki di tingkat SE_L = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_P = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas TPAK = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_P, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja G_L = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender

		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	iBangga = 1/3 (indeks ketentraman + indeks kemandirian + indeks kebahagiaan) x 100%
	Terwujudnya kinerja DP3AP2KB yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>$TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)</p> <p>PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)</p> <p>$P_{(15+,p)}$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)</p>

		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	<div>Metode Perhitungan</div> <div>Bobot masing-masing kluster:</div> <table><thead><tr><th>Kluster</th><th>Bobot</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Hak Sipil dan Kebebasan</td><td>20%</td></tr><tr><td>2. Lingkungan Keluarga dan Pengawasan Alternatif</td><td>22%</td></tr><tr><td>3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</td><td>18%</td></tr><tr><td>4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya</td><td>18%</td></tr><tr><td>5. Perlindungan Khusus</td><td>22%</td></tr></tbody></table> <div>Perumusan yang digunakan untuk memperoleh indeks kluster IPA adalah sebagai berikut:</div> <div>$\text{Indeks } K_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n IX_{ij}}{n_j} \right) \times 100$</div> <div>dimana</div> <div>Indeks K_j : nilai indeks kluster ke-j</div> <div>IX_{ij} : nilai indikator ke-i pada kluster ke-j yang telah dinormalisasi</div> <div>n_j : banyaknya indikator pada kluster ke-j</div> <div>Kemudian, nilai IPA diperoleh dengan mengalikan bobot kluster dengan indeks kluster. Perumusan yang digunakan untuk penghitungan IPA adalah sebagai berikut:</div> <div>$\sum_{j=1}^n W_j \times \text{Indeks } K_j$</div>	Kluster	Bobot	1. Hak Sipil dan Kebebasan	20%	2. Lingkungan Keluarga dan Pengawasan Alternatif	22%	3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	18%	4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	18%	5. Perlindungan Khusus	22%
Kluster	Bobot															
1. Hak Sipil dan Kebebasan	20%															
2. Lingkungan Keluarga dan Pengawasan Alternatif	22%															
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	18%															
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	18%															
5. Perlindungan Khusus	22%															
Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	<div>$IPBK = (D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5)^{\frac{1}{5}}$</div>													

15. DINAS SOSIAL

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan berbagai aspek kehidupan sosial. IKS dibangun dari aspek-aspek kesejahteraan sosial yang mencakup dimensi-dimensi utama seperti: Ketahanan Keluarga, Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Sosial, Partisipasi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Layak, Perlindungan Sosial, Pekerjaan dan Pendapatan, dan Lingkungan Sosial. Setiap dimensi diukur menggunakan beberapa indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan dinilai dengan menggunakan skala tertentu Review (Belum ada perhitungan)
	Terwujudnya kinerja Dinas Sosial yang akuntabel dan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan

	profesional			berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persen	<p>X = Jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi</p> <p>Y = Jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial</p> <p>Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$</p>
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial	Persen	<p>Rumus:</p> <p>X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.</p> <p>Y = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah Kabupaten/ kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti.</p> <p>Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$</p>
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam, atau Non Alam	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	<p>Rumus:</p> <p>X = Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya.</p> <p>Y = Jumlah Korban Bencana alam dan sosial di</p>

		pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		daerah kota yang membutuhkan kebutuhan dasar/ Perlindungan Sosial Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
--	--	---	--	--

16. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Perumahan dan Permukiman Yang Layak Huni dan Didukung Dengan Ketersediaan Infrastruktur Permukiman Yang Inklusif dan Berkualitas		Indeks Infrastruktur Permukiman	Persen	Formula Perhitungan Indeks Infrastruktur Permukiman : $\% \text{ Jalan Lingkungan} + \% \text{ Drainase Lingkungan} + \% \text{ RTP} + \% \text{ Penanganan Rutilahu}$ Jumlah Komponen Infrastruktur Permukiman yang masuk Perhitungan
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh Secara Terpadu	Luas Kawasan Kumuh yang di tangani secara terpadu	Hektar (Ha)	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani secara terpadu dibagi Luas Total Kawasan Kumuh
	Terpenuhinya Hunian Layak yang Terjangkau dan Didukung Oleh PSU yang Berkualitas	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	Persentase Rumah Tangga (KK) dengan hunian layak dibagi jumlah rumah tangga (KK) dikali 100

	Terwujudnya kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang profesional dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
--	--	---	------	---

17. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Mewujudkan ekosistem dan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat, serta meningkatkan daya beli serta ketahanan pangan, dan mengoptimalkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	PDRB sektor pertanian dibagi total PDR dikali 100%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan, selaras dengan upaya pelestarian laut dan keanekaragaman hayati, demi mendorong peningkatan konsumsi ikan di kalangan masyarakat.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	<p>1. Perhitungan Jumlah Produksi Berdasarkan Volume (Tonase)</p> $JP = \sum_{i=1}^n (Q_i)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JP = Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) • Q_i = Volume hasil tangkapan per trip atau per jenis ikan (kg atau ton) • n = Jumlah total trip atau jumlah spesies yang dihitung <p>Menjumlahkan seluruh hasil tangkapan (Q_i), baik per trip</p>

				penangkapan maupun per jenis ikan, hingga jumlah total trip atau jenis ikan yang ada (n)
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	<p>1. Perhitungan Jumlah Produksi Berdasarkan Volume Panen</p> $JP = \sum_{i=1}^n (Q_i)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JP = Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (kg atau ton) • Q_i = Volume hasil panen per spesies atau unit budidaya (kg atau ton) • n = Jumlah total unit budidaya yang dihitung <p>Menjumlahkan seluruh hasil panen (Q_i) dari setiap unit budidaya (misalnya kolam, keramba, tambak) atau dari setiap jenis spesies ikan yang dibudidayakan, sampai jumlah unit budidaya yang ada (n).</p>
	Peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian yang didukung oleh penguatan prasarana pertanian serta pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang efektif, serta penanggulangan bencana pertanian yang responsif. Upaya ini diiringi dengan kemudahan perizinan usaha pertanian dan peningkatan kapasitas sumber	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%) = (produksi tahun berjalan dikurangi produksi tahun dasar) dibagi produksi tahun dasar dikali 100%
		Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	Peningkatan Produksi Holtikultura (%) = (produksi tahun berjalan dikurangi produksi tahun dasar) dibagi produksi tahun dasar dikali 100%

	daya manusia di bidang penyuluhan pertanian.			
	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang diiringi dengan penguatan penanganan daerah rawan pangan serta intensifikasi pengawasan mutu dan keamanan pangan.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	<p>Secara Konsep, rumus PoU menurut FAO adalah:</p> $PoU = \int_0^L f(z) dz$ <p>Dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $f(z)$ = fungsi distribusi konsumsi energi pangan per kapita (biasanya diasumsikan berdistribusi log-normal) • z = konsumsi energi pangan (kkal/kapita/hari) • L = batas bawah kebutuhan energi minimum (MDER) <hr/> <p>Secara praktis, PoU dihitung sebagai:</p> $PoU = \frac{\text{Jumlah penduduk dengan konsumsi energi} < \text{MDER}}{\text{Jumlah total penduduk}} \times 100\%$ <hr/> <p>(jumlah penduduk dengan konsumsi energi < MDER) dibagi jumlah total penduduk dikali 100%</p>

18. DINAS PERHUBUNGAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar.		Indeks Infrastruktur Perhubungan	Poin	(Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan terpasang pada jalan kota / Jumlah Total Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Kota) x 100 %
	Terwujudnya Kinerja Perangkat daerah yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Wilayah	Poin	<i>Jumlah trayek angkutan umum yang beroperasi : Jumlah kebutuhan trayek angkutan umum di Kota Cilegon (cara perhitungan belum ada)</i>

19. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat		Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum	Nilai	$I_{IPKKU} = \sum_n (WD^i \times WS_n^i \times S_n^i)$ <p>Indikator trantibumlinmas sub urusan trantibum = Sigma dari nilai bobot pada dimensi ke I x Nilai bobot pada sub dimensi ke-n dimensi ke-I x Nilai rata-rata skala likert pada indikator I sub dimensi ke dimensi ke-I / Jumlah skala likert yang digunakan</p>
	Terwujudnya Kinerja Satpol PP yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan

				publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang Aman dan Kondusif	Tercapainya Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Trantibum Kategori Baik	Daerah	$I_{IPKKU} = \sum_n^i (WD^i \times WS_n^i \times S_n^i)$ <p>Indikator trantibumlinmas sub urusan trantibum = Sigma dari nilai bobot pada dimensi ke I x Nilai bobot pada sub dimensi ke-n dimensi ke-I x Nilai rata-rata skala likert pada indikator I sub dimensi ke dimensi ke-I / Jumlah skala likert yang digunakan</p> <p>Dari Perhitungan Indeks selanjutnya mengkategorikan IPKKU dalam jangkauan nilai lebih dari 60,00</p>
		Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Persen	(Jumlah pengaduan yang diselesaikan / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk) x 100%

		Terpenuhinya Capaian Mutu Layanan SPM Sub Urutan Trantibum	Daerah	Nilai rata-rata persentase indeks pencapaian mutu dikalikan bobot mutu, dan persentase indeks penerima layanan dikalikan bobot penerima
--	--	--	--------	--

20. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Transformasi layanan Publik berbasis digital, layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan serta meningkatnya keamanan Informasi		Indeks Pemerintahan Digital	Poin	Perhitungan Skor DGI = $\sum(\text{Nilai Subkomponen} \times \text{Bobotnya})$ Total skor berada dalam rentang 0–100. Rererensi : Keputusan Menteri PANRB No. 108 Tahun 2023 tentang Kerangka Indeks Pemerintahan Digital (Digital Government Index/DGI)
	Terwujudnya Kinerja Dinas Kominfo Statistik dan Persandian yang akuntabel dan Profesional	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Persen	<p>Penilaian keterbukaan informasi publik biasanya dilakukan melalui mekanisme evaluasi dan monitoring, yang melibatkan berbagai faktor seperti: Pelaksanaan Penyediaan Informasi, Tingkat Aksesibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas, Penyediaan Informasi yang dikecualikan, Partisipasi Publik</p> <p> $\text{Nilai KIP} = \frac{\sum (I_i \times W_i)}{\sum W_i} \times 100$ $\text{Nilai KIP} = \frac{\sum W_i \sum (I_i \times W_i)}{\sum W_i} \times 100$ </p> <p>Keterangan:</p> <p>I_i: Nilai indikator ke-i (skala 0–100)</p> <p>W_i: Bobot indikator ke-i (misalnya dalam %)</p> <p>$\sum W_i$: Jumlah bobot keseluruhan (biasanya 100%)</p> <p>Hasil akhir dinyatakan dalam bentuk persentase (%)</p>

	Meningkatnya layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Tingkat Kematangan Pemerintah Digital	Poin	<p>Indeks Kematangan Pemerintah Digital (Indeks Kematangan Teknologi dan Layanan Digital Pemerintah) =</p> $((0,25 \times \text{Pembangunan/Pengembangan Aplikasi}) + (0,25 \times \text{Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional}) + (0,25 \times \text{Layanan Jaringan Intra Pemerintah} + (0,25 \times \text{Pemanfaatan Teknologi Baru}) + (0,13 \times \text{Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan}) + (0,20 \times \text{Layanan Administrasi Pemerintahan} + (0,13 \times \text{Pemanfaatan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan}) + (0,20 \times \text{Keterpaduan Pelayanan Publik Digital}) + (0,13 \times \text{Pemanfaatan Portal Nasional Pelayanan Publik}) + (0,20 \times \text{Pemanfaatan Identitas Digital}$

				<p>Nasional)/2)</p> <p>Indeks Kematangan Pemerintah Digital =$\sum W_i \sum (I_i \times W_i)$</p> <p>Keterangan:</p> <p>Ii: Skor indikator ke-i (misalnya dari skala 1–5 atau 0–1)</p> <p>wi: Bobot indikator ke-i (berdasarkan prioritas dan kontribusinya)</p> <table><tr><th>Tingkat Kematangan</th><th>Kriteria</th><th>Penjelasan</th></tr><tr><td>1</td><td>Berlain</td><td>Implementasi tanpa pedoman dan tanpa perencanaan yang terarah</td></tr><tr><td>2</td><td>Terdeteksi</td><td>Implementasi sesuai pedoman dan program yang terarah, namun belum komprehensif untuk semua proses dan lingkup</td></tr><tr><td>3</td><td>Terdasarkan</td><td>Implementasi secara komprehensif untuk semua proses dan lingkup sesuai pedoman dan program yang terarah</td></tr><tr><td>4</td><td>Terintegrasi/Terspadu dan Terukur</td><td>Implementasi: integrasi/keterpaduan nasional, dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan</td></tr><tr><td>5</td><td>Optimum</td><td>Optimalisasi kapasitas implementasi berdasarkan hasil evaluasi</td></tr></table>	Tingkat Kematangan	Kriteria	Penjelasan	1	Berlain	Implementasi tanpa pedoman dan tanpa perencanaan yang terarah	2	Terdeteksi	Implementasi sesuai pedoman dan program yang terarah, namun belum komprehensif untuk semua proses dan lingkup	3	Terdasarkan	Implementasi secara komprehensif untuk semua proses dan lingkup sesuai pedoman dan program yang terarah	4	Terintegrasi/Terspadu dan Terukur	Implementasi: integrasi/keterpaduan nasional, dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan	5	Optimum	Optimalisasi kapasitas implementasi berdasarkan hasil evaluasi
Tingkat Kematangan	Kriteria	Penjelasan																				
1	Berlain	Implementasi tanpa pedoman dan tanpa perencanaan yang terarah																				
2	Terdeteksi	Implementasi sesuai pedoman dan program yang terarah, namun belum komprehensif untuk semua proses dan lingkup																				
3	Terdasarkan	Implementasi secara komprehensif untuk semua proses dan lingkup sesuai pedoman dan program yang terarah																				
4	Terintegrasi/Terspadu dan Terukur	Implementasi: integrasi/keterpaduan nasional, dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan																				
5	Optimum	Optimalisasi kapasitas implementasi berdasarkan hasil evaluasi																				
	Meningkatnya Kualitas dan Pemanfatan Data Statistik Sektoral dan Spasial	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	Nilai indeks pembangunan statistik dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot																		

				<p>Domain Indeks Pembangunan Statistik = $\sum_{K=1}^K \text{Bobot Domain}_K \times \text{Nilai Domain}_K$</p> <p>dengan K adalah banyaknya domain penilaian; Bobot Domain K adalah nilai bobot domain ke -K; Nilai Domain K adalah indeks domain ke -K;</p>
	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Persen	<p>Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan informasi pada Dinas Kominfo, mencakup aspek-aspek keamanan informasi yang penting untuk melindungi data dan sistem informasi.</p> <p>Indeks KAMI = (0,2 x Kebijakan Keamanan Informasi) + (0,2 x Organisasi dan Manajemen Keamanan) + (0,25 x Keamanan Infrastruktur) + (0,25 x Keamanan Aplikasi) + (0,1 x Manajemen Risiko)</p>

				<p>Skor Indeks KAMI Total=$\sum(S_i \times W_i)$</p> <p>Keterangan:</p> <p>S_i: Skor indikator/subaspek ke-i (biasanya skala 0–4)</p> <p>W_i: Bobot dari masing-masing subaspek</p> <p>Skor total adalah hasil penjumlahan seluruh skor subaspek yang telah dikalikan bobotnya</p> <p>Skala Indeks KAMI berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Keamanan Informasi.</p> <p>bersifat kuantitatif dan dikategorikan ke dalam tingkat kematangan (maturity level), yaitu:</p> <p>Total Skor Indeks KAMI Level Kematangan Makna</p>
--	--	--	--	--

				<p>0 – 300 Sangat Rendah Belum ada penerapan keamanan informasi.</p> <p>301 – 500 Rendah Baru inisiatif awal, belum sistematis.</p> <p>501 – 700 Sedang Sudah ada kebijakan dan penerapan terbatas.</p> <p>701 – 875 Tinggi Penerapan menyeluruh namun belum optimal.</p> <p>876 – 1000 Sangat Tinggi Penerapan optimal dan berkelanjutan.</p>
--	--	--	--	--

21. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien		Indeks Pelayanan Publik	Poin	$\text{IPP} = 0,24 \times \text{skor aspek kebijakan pelayanan} + 0,25 \times \text{skor aspek profesionalisme} + 0,18 \times \text{skor aspek sarana prasarana} + 0,11 \times \text{skor aspek sistem informasi pelayanan publik} + 0,1 \times \text{skor nilai konsultasi dan pengaduan} + 0,12 \times \text{skor nilai inovasi pelayanan};$ <p>Skor aspek adalah jumlah skor indikator pada masing-masing aspek, dengan bobot nilai indikator sesuai dengan yang sudah ditentukan.</p> <p>Kategori indeks pelayanan publik :</p>

					0,00 - 1,00 , kategori F, makna gagal 1,01 - 1,50, kategori E, makna sangat buruk 1,51 - 2,00, kategori D, makna buruk 1,51 - 2,00, kategori C-, makna cukup (dengan catatan) 2,51 - 3,00, kategori C, makna cukup 3,01 - 3,50. kategoir B-, makna baik (dengan catatan) 3,51 - 4,00, kategori B, makna baik 4,01 - 5,50, kategori A-, makna sangat baik 4,51- 5,00, kategori A, makna pelayanan prima	
	Terwujudnya Kinerja Disdukcapil Akuntabel Profesional	Kinerja yang dan	Indeks Birokrasi Daerah	Reformasi Perangkat	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan

				publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya Layanan Pendaftaran Penduduk yang Profesional	Persentase Kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	<ol style="list-style-type: none">1. Perekaman KTP-el : jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP-el dibagi jumlah penduduk wajib KTP (penduduk 17 tahun keatas) dikalikan 100%2. Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan: Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi Jumlah total anak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan KIA dikalikan 100%3. Cakupan Surat Keterangan Pindah Keluar Kota Cilegon : Jumlah Surat Keterangan Pindah Keluar yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan Surat Keterangan Pindah Keluar Kota Cilegon dikalikan 100%

				<p>4. Cakupan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT): Jumlah SKTT yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan SKTT dikalikan 100%</p> <p>5. Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD): Jumlah penduduk dengan kepemilikan IKD dibagi jumlah penduduk wajib KTP yang sudah melakukan perekaman KTP-el dikalikan 100%</p>
	Terwujudnya Layanan Pencatatan Sipil yang Profesional	Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	Persen	<p>1. Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan : Jumlah penduduk usia 0 s.d 17 tahun dengan Akta Kelahiran dibagi Jumlah total penduduk usia 0 s.d 17 tahun dikalikan 100%</p> <p>2. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan:</p>

				<p>Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan dibagi jumlah total peristiwa kematian yang dilaporkan dikalikan 100%</p> <p>3. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan: Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan dibagi Jumlah total pasangan yang perkawinannya dilaporkan dikalikan 100%</p> <p>4. Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan: Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan dibagi jumlah total peristiwa perceraian yang dilaporkan dikalikan 100%</p>
	Terwujudnya Pengelolaan Informasi	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data	Persen	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan

	Administrasi Kependudukan yang Profesional	kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama		Perjanjian Kerjasama atau berdasarkan surat permohonan terhadap Jumlah OPD dan lembaga lintas sektoral lainnya (42 OPD dan lembaga lintas sektoral lainnya)
	Terwujudnya Pengelolaan Profil Kependudukan yang Berkualitas	Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan	Persen	Jumlah jenis data profil yang tersedia dibagi dengan jumlah jenis data yang seharusnya tersedia (63 jenis data) dikali 100%

22. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Berkurangnya Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	'Risk = Hazard dikali (vulnerability dibagi capacity) keterangan : hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya
	Meningkatnya Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya kualitas penanganan bencana kebakaran dan penyelamatan	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah rata-rata persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan perhitungan:

				<p>(Capaian layanan pemadam penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan Tingkat waktu tanggap (respon time)</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Capaian layanan pemadam, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam Tingkat waktu tanggap (respon time) oleh BALAKAR)</p> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">2</p>
		Persentase layanan penyelamatan, dan evakuasi kejadian non kebakaran	Persen	<p>Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota dalam tahun X dibagi total kejadian non kebakaran</p>

23. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya koperasi dan UMKM yang berdaya saing		Kontribusi Koperasi Terhadap PDRB	Persen	(pendapatan koperasi dibagi PDRB) dikali 100%
		Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	(jumlah pendapatan atau omset pelaku usaha mikro pada database UMKM tahun n dibagi PDRB tahun n) dikali 100%
	Meningkatnya koperasi sehat sesuai kewenangan kota/kab	Persentase Koperasi Sehat	Persen	Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat dibagi jumlah koperasi yang RAT kewenangan kab/kota dikali 100%
	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi	Persen	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan dikali

		Wirausaha		100%
	Terwujudnya kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

24. DINAS TENAGA KERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tenaga kerja yang Berdaya Saing dan Perlindungan Ketenagakerjaan		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Mengacu pada publikasi sakernas Badan Pusat Statistik jumlah pengangguran (usia angkatan kerja tetapi belum bekerja) dibagi jumlah angkatan kerja yang sudah bekerja) dikali 100%
	Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten /	Persen	Pencari kerja yang Ditempatkan / Pencari kerja yang terdaftar)*100% Pencari kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) baik melalui pelatihan serta yang Dimagangkan dibagi Pencari

		kota		kerja yang terdaftar dikali 100%
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan dikali 100%
	Terwujudnya Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

25. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya pertumbuhan industri dan perdagangan daerah yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	$\left(\frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Total PDRB}} \right) \times 100\%$ PDRB Sektor Perdagangan: Perdagangan Besar dan Eceran
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	$\left(\frac{\text{PDRB Sektor industri}}{\text{Total PDRB}} \right) \times 100\%$ PDRB Sektor rindustri: Industri Pengolahan
	Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi

	dan Perdagangan yang Akuntabel dan Profesional	Daerah		kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Poin	Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember Tahun N (<i>Hasil Publish BPS</i>) $\frac{\text{harga barang atau jasa tahun berjalan} \times \text{bobot pengeluaran masing-masing pengeluaran atau jasa}}{\text{harga barang dan jasa pada tahun dasar} \times \text{bobot pengeluaran masing-masing pengeluaran atau jasa}} \times 100\%$
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persen	$\frac{(\text{Jumlah IKM tahun N} - \text{Jumlah IKM tahun N-1})}{\text{Jumlah IKM tahun N-1}} \times 100\%$

26. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya iklim investasi yang kondusif		Pertumbuhan realisasi investasi	Persen	$((\text{Realisasi investasi tahun } n - \text{Realisasi investasi tahun } n-1) / \text{Realisasi investasi tahun } n-1) \times 100\%$
	Terwujudnya kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

	Meningkatnya investasi daerah	Realisasi Investasi	Rupiah per Tahun	Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada Tahun n
--	-------------------------------	---------------------	------------------	---

27. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya generasi muda dan pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	Perhitungan IPP merupakan hasil survey, yang mencakup 5 domain dan 15 indikator
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	(PDRB Akomodasi Makanan dan Minuman Harga Konstan 2010 : Total PDRB)*dikali 100% *kenaikan 2,5% per tahun
	Terwujudnya generasi muda dan olahraga yang berkualitas dan berdaya saing	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	(Jumlah Wirausaha Muda dibagi Total Angkatan Kerja) x 100%
		Tingkat Prestasi Olahraga	Persen	(Jumlah nomor pertandingan yang berprestasi pada seluruh cabang olahraga dibagi jumlah nomor pertandingan olahraga pada seluruh cabang olahraga yang diikuti minimal di tingkat

				Provinsi) x 100%
	Terwujudnya potensi wisata yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	<p>Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun berjalan.</p> <p>*Diproyeksikan terdapat kenaikan jumlah kunjungan sebesar 5% pertahun</p>
	Terwujudnya kinerja Disporapar yang akuntabel dan profesional	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

28. KECAMATAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan		Skor Penilaian Kecamatan	Poin	<p>Skor Kecamatan = $\frac{\sum(\text{Bobot}_i \times \text{Nilai}_i)}{\sum \text{Bobot}_i}$ dengan keterangan:</p> <p>Nilai_i = skor capaian indikator ke-i (skala bisa 0–100)</p> <p>Bobot_i = bobot kepentingan indikator ke-i (jumlah total bobot = 100%)</p> <p>Range nilai :</p> <p>91 - 100 -- Unggul 80 - 90,99 -- Sangat Baik 65 - 79,99 -- Baik 50,00 - 64,99 -- Cukup <50,00 – Kurang</p>

	Terwujudnya Kinerja Kecamatan yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya Kualitas Pembangunan Kecamatan yang Berkelanjutan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	<p>Rumus : $(X/Y) \times 100\%$</p> <p>X = Jumlah Kelurahan Cepat Berkembang di Wilayah Kecamatan</p> <p>Y = Jumlah Kelurahan yang Ada di Wilayah Kecamatan</p>



WALI KOTA CILEGON,

ROBINSAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. LIA NURLIA MAHATMA, ST., M.Si.**

Jabatan : **KEPALA DP3AP2KB KOTA CILEGON**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ROBINSAR**

Jabatan : **WALI KOTA CILEGON**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon,

2025



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DP3AP2KB KOTA CILEGON

No.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak dan Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,248
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65,50
1	Terwujudnya kinerja DP3AP2KB yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	72,85
2	Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	44,43
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71,30
3	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	73,60

PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 13.479.423.936
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 1.237.963.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 257.771.900
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp. 40.801.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp. 120.943.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (PKA)	Rp. 472.030.625
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 597.070.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp. 147.200.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp. 11.358.943.540
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp. 2.655.719.000
Total Anggaran	Rp. 30.367.866.001

Pihak Kedua,



ROBINSAR

Cilegon, 2025

Pihak Pertama,



Hi. LIA NURLIA MAHATMA, ST., M.Si.
NIP. 197107081997032005